

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI)**

RAHMATIKA FIRMANSYAH

1706617021



*Building
Future
Leaders*

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI Jakarta

2020

LEMBAR EKSEKUTIF

Nama : Rahmatika Firmansyah

Nomor registrasi : 1706617021

Program studi : S1 Akuntansi

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada Badan Pemeriksa Republik Indonesia (BPK RI)

Praktikan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 44 hari kerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dimulai pada tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2020. Tugas utama yang diberikan oleh pembimbing kepada praktikan adalah menelaah beberapa laporan keuangan, diantaranya Laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester I Tahun 2020, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020. Yang menjadi perhatian praktikan dalam menelaah laporan keuangan tersebut adalah menelaah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas pada masing-masing ketiga laporan keuangan tersebut. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan akibat pandemi Covid-19 yang membuat praktikan tidak bisa mengakses beberapa aplikasi sistem. Oleh karena itu, praktikan terus berdiskusi dengan pembimbing terkait dokumen pembanding apa saja yang menjadi acuan praktikan dalam menelaah ketiga Laporan keuangan tersebut.

Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Akuntansi dan Pelaporan

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi S-1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Dr. IGKA Ulupui, SE, M.Si, AK, CA

NIP. 196612131993032003

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji,		
<u>Dr. Ety Gurendrawati, M.Si, Ak</u> NIP. 196803141992032002		25/12/2020
Penguji Ahli,		
<u>Siti Fatimah Zahra, S.E.I., M.E</u> NIP. 199108182019032019		22/12/2020
Dosen Pembimbing,		
<u>Adam Zakaria, M.Ak, Ph.D</u> NIP. 197504212008011011		24/12/2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur praktikan panjatkan kepada Allah SWT yang sudah memberikan praktikan kesehatan, kesempatan, dan kelancaran kepada praktikan sehingga mampu menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini disusun berdasarkan hasil dari kegiatan PKL yang dilaksanakan pada tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2020 dan dibuat sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Dalam proses penulisan laporan ini, praktikan ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan PKL ini. Laporan yang selesai ini tidak terlepas dari keterkaitan banyak pihak yang telah mendukung, membantu, membimbing, dan mengarahkan. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada:

1. Orang tua yang sudah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga laporan ini selesai;
2. Dr. Ari Saptono, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E., M.Si.Ak, C.A, selaku ketua Program Studi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
4. Bapak Adam Zakaria, S.E., Akt, M.Si, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam membantu praktikan selama penyusunan laporan PKL ini;
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis duduk di bangku perkuliahan;
6. Ibu Wiwin Adhi Tama selaku Staff Bagian Akuntansi dan Pelaporan BPK RI sekaligus pembimbing PKL; dan
7. Seluruh keluarga besar, para sahabat, dan orang-orang terdekat yang memberikan dukungan dan doa kepada praktikan.

Praktikan menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, kritik dan juga saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu praktikan harapkan demi kesempurnaan laporan ini.

Jakarta, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR EKSEKUTIF	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang PKL.....	1
B. Maksud dan Tujuan PKL.....	7
C. Kegunaan PKL.....	8
D. Tempat PKL.....	10
E. Jadwal Waktu PKL	11
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	14
A. Sejarah Perusahaan.....	14
B. Struktur Organisasi.....	19
C. Kegiatan Umum Instansi	28
BAB III PELAKSANAAN PKL.....	30
A. Bidang Kerja	30
B. Pelaksanaan Kerja	32
C. Kendala yang Dihadapi	62
D. Cara Mengatasi Kendala.....	63
BAB IV KESIMPULAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1: Logo BPK RI.	14
Gambar II. 2: Struktur Organisasi BPK RI.	20
Gambar II. 3: Struktur Organisasi Sekretaris Jenderal	21
Gambar II. 4: Struktur Organisasi Biro Keuangan BPK RI.	23
Gambar III.1: Aplikasi SIMAK BMN.....	33
Gambar III.2: Aplikasi E-Reckon.....	34
Gambar III.3: Aplikasi Persediaan.....	35

DAFTAR BAGAN

Bagan III. 1: Proses Menelaah Laporan Keuangan BPK RI secara general.	31
Bagan III. 2: Proses Menelaah Laporan Realisasi Anggaran.....	37
Bagan III. 3: Proses Menelaah Laporan Neraca secara umum.....	47
Bagan III. 4: Proses Penghapusan Aset Tetap.....	55
Bagan III. 5: Proses menelaah Laporan Operasional.	58
Bagan III. 6: Proses menelaah Laporan Perubahan Ekuitas.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1: Koreksi pada akun-akun masing-masing Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan.	51
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL.....	73
Lampiran 2: Surat Penerimaan PKL.....	74
Lampiran 3: Nota Dinas.....	75
Lampiran 4: Surat Penempatan Magang.....	76
Lampiran 5: Daftar Hadir PKL.....	77
Lampiran 6: Absen Harian PKL untuk BPK RI.....	80
Lampiran 7: Laporan PKL Mingguan untuk BPK RI.....	82
Lampiran 8: Rincian Kegiatan PKL.....	83
Lampiran 9: Form Analisis LRA.....	88
Lampiran 10: Face LRA.....	89
Lampiran 11: CaLK LRA.....	90
Lampiran 12: Ringkasan LRA.....	95
Lampiran 13: BAR Estimasi KPPN.....	96
Lampiran 14: Neraca Percobaan Akrual.....	97
Lampiran 15: Kertas Kerja Analisa Belanja Modal dan Mutasi.....	98
Lampiran 16: ADK SAIBA (LK BPK RI Perwakilan NTB TW III 2020).....	99
Lampiran 17: Tabel 7 Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja (LK BPK RI Perwakilan NTB TW III 2020).....	100
Lampiran 18: Tabel 18 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30 September 2019 (LK BPK RI Perwakilan NTB TW III 2020).....	101
Lampiran 19: Form Analisis Neraca.....	102
Lampiran 20: CaLK Neraca.....	103
Lampiran 21: Face Neraca.....	104
Lampiran 22: Saldo UP di LPJ Bendahara Pengeluaran Semesteran.....	105
Lampiran 23: Daftar Penyetoran Sisa UP Semesteran.....	107
Lampiran 24: Laporan Barang Persediaan dari BMN.....	109
Lampiran 25: Laporan Posisi BMN.....	110
Lampiran 26: Berita Acara Stock Opname.....	111
Lampiran 27: Caring BMN.....	112
Lampiran 28: Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel.....	113
Lampiran 29: Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel....	114
Lampiran 30: Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud.....	115
Lampiran 31: Kartu Piutang/Lampiran Daftar Rekapitulasi PNBPN.....	116
Lampiran 32: Lampiran Kartu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.....	117
Lampiran 33: Kertas Kerja Saldo Belanja Dibayar di muka.....	118
Lampiran 34: Kertas Kerja Pembelian Persediaan.....	119
Lampiran 35: Status Tanah.....	120

Lampiran 36: Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka	121
Lampiran 37: Lampiran A1	122
Lampiran 38: Lampiran A1.a	123
Lampiran 39: Jurnal Penyesuaian	124
Lampiran 40: Analisis Form LO	125
Lampiran 41: Neraca Face LO	126
Lampiran 42: CaLK LO	127
Lampiran 43: Neraca Percobaan AkruaL LO	128
Lampiran 44: Analisis Form LPE	129
Lampiran 45: Neraca Face LPE	130
Lampiran 46: CaLK LPE	131
Lampiran 47: Kertas Kerja Analisis Satuan Kerja Laporan BPK RI	132
Lampiran 48: Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka	135
Lampiran 49: Surat Keterangan Selesai PKL	137
Lampiran 50: Penilaian PKL Universitas Negeri Jakarta	138
Lampiran 51: Penilaian PKL untuk BPK RI	139
Lampiran 52: Kartu Konsultasi PKL	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Pelayanan publik merupakan satu-satunya tolok ukur yang dapat dilihat oleh masyarakat secara nyata. Hal ini dikarenakan, masyarakat dapat melihat langsung dan menilai bagaimana kinerja pelayanan yang diberikan. Maka dari itu, kualitas dari pelayanan publik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga adalah satu-satunya hal yang harus ditingkatkan (Kurniawan, 2017). Menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, instansi pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat maupun daerah termasuk komisi-komisi, dewan, badan yang mendapat dana dari APBN/APBD (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Maka dari itu, pelaku/pelaksana UU Administrasi Pemerintahan ini di Indonesia adalah Instansi Pemerintah.

Lingkungan akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang perlu dan penting dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan dan pelaporan tersebut adalah bagaimana bentuk umum pemerintahan dan pelayanan yang diberikan, bagaimana pengaruh proses politik, bagaimana hubungan antara pembayaran pajak dengan terlaksananya pelayanan pemerintah dan bagaimana sistem pemerintahan otonomi dan transfer

pendapatan antar pemerintah. Ciri keuangan pemerintah yang penting untuk pengendalian adalah bagaimana anggaran dapat digunakan sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian, bagaimana investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, dan sebagainya (Peraturan Pemerintah RI, 2010).

Untuk melaksanakan lingkungan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat, pemerintah harus peka terhadap fungsi pemeriksaan yang memadai. Fungsi audit yang baik akan dapat membantu pemerintah dalam mendeteksi dan mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan dan korupsi. Agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di negara maupun daerah, maka dibentuklah Inspektorat. Inspektorat merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi umum dari audit pemerintahan adalah tentu saja memeriksa dan bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam rekomendasi perbaikan di bidang pemerintahan. Audit pemerintahan juga harus mampu mendeteksi penyimpangan dan menginformasikan secara cepat kepada pemerintah terkait (Gamar & Djamhuri, 2015).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga tinggi negara yang dibentuk yang bersifat bebas dan mandiri dan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki lembaga perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. BPK merupakan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara. BPK adalah satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan besar dalam memberikan opini terhadap pengelolaan

dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan pada laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja pemerintah, dan pemeriksaan lainnya dengan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara/daerah yang hasil pemeriksaannya akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti. BPK juga berwenang dalam menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum secara disengaja maupun tidak disengaja oleh bendahara, pengelola keuangan negara, lembaga atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Dalam tujuannya memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pemerintah akan menindaklanjuti berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan BPK. BPK juga terus mengupayakan kinerja yang optimal dalam mempercepat pemberantasan korupsi, oleh karena peran strategis BPK adalah melindungi keuangan negara, BPK bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendeteksi pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini dilakukan oleh BPK untuk menciptakan masyarakat dengan moralitas anti korupsi yang lambat laun akan terwujud. BPK selalu mengupayakan independensi dalam melakukan audit keuangan negara dan melakukan integritas serta transparansi dalam menyampaikan hasil audit kepada masyarakat (Raba', 2017).

Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat dimana teknologi informasi sudah marak dan menjadi basis dalam kehidupan sehari-hari manusia. Akibat dari era 4.0 ini, semua hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan data dan daya komputasi yang tidak terbatas karena perkembangan internet dan teknologi yang sangat masif sebagai inti dari pergerakan dan konektivitas manusia dan mesin. Era ini sangat mendisrupsi aktivitas apapun yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta pendidikan tinggi (Kementrian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2018).

Menurut Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) yang juga kepala BPPT Hammam Riza di acara webinar dengan tema Peran Audit Teknologi dalam Revolusi Industri 4.0, hal-hal yang sebelumnya merupakan sebuah perencanaan dalam menerapkan kemajuan teknologi 4.0 guna meningkatkan daya saing menjadi sebuah tantangan bagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia, apalagi di masa pandemi ini, kita bisa langsung merasakannya sejalan dengan upaya melakukan pemulihan ekonomi.

Revolusi industri 4.0 menjadi bagian yang sangat penting bagi stake holder yang membangun ekosistem industri 4.0. Saat ini dan selanjutnya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ingin mengembangkan teknologi yang akan mengungkit sektro prioritas riset nasional seperti menerapkan Strategi Nasional Kecerdasan Artificial. Tertuang dalam Undang-Undang SISNAS IPTEK Tahun 2019, audit teknologi merupakan proses sitematika untuk

memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019).

Pelaksanaan audit teknologi ini mengacu kepada Kode Etik dan Standar serta Pedoman Audit Teknologi. Auditor teknologi diharapkan dapat menjadi pengukur teknologi yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat yang akan menjadi sebuah upaya Indonesia untuk keluar dari ketergantungan terhadap produk luar negeri (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020).

Kinerja BPK harus disertai dengan sikap independensi dalam mengaudit laporan keuangan negara, tidak hanya itu BPK harus menjaga integritas dan transparansinya dalam menyampaikan hasil audit kepada masyarakat, hal ini sangat berkaitan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BPK, khususnya kepada Pemerintah Indonesia. Kepercayaan masyarakat sangatlah penting, karena keuangan negara bersumber dari rakyat dan sudah selayaknya dikelola dan didistribusikan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, peran BPK dalam mewujudkan sikap transparansi, independensi, dan integritas tinggi sangatlah penting agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat dan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Arti dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka dan jujur. Penerapan ini juga menunjang penerapan *good governance* yang selanjutnya akan menjadikan salah satu prinsip pemerintahan menjadi baik dan berkualitas. Dengan demikian, penerapan transparansi yang baik oleh BPK

meningkatkan pengaruh yang baik pada GCG dan membuat masyarakat percaya bahwa pemerintahan mengelola keuangan dengan baik tanpa tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Raba', 2017).

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Meskipun banyak tantangan dan terhambat jarak karena dilaksanakan secara WFH, hal ini tidak menjadi alasan program magang dihentikan. Program Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang menjadi mata kuliah pada Program S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Banyak manfaat yang bisa didapat mahasiswa dalam melaksanakan PKL, yaitu mahasiswa dapat terjun langsung merasakan kondisi kerja secara nyata. Mahasiswa juga akan mendapat banyak pengetahuan baru, wawasan yang lebih luas, dan belajar beradaptasi di dalam lingkungan kerja dengan banyak dan beragam budaya. Meskipun WFH, mahasiswa tetap melaksanakan program PKL ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan.

Program PKL ini juga membantu mahasiswa khususnya mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta mempelajari bagaimana mencapai kualitas Sumber Daya Manusia yang baik dan kompeten. Dengan demikian, pihak Universitas Negeri Jakarta dapat mencetak alumni-alumni terbaik yang kompeten dan tidak kalah bersaing untuk berperan dalam pembangunan ekonomi yang baik kedepannya.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) auditor pemerintah saat ini sangatlah baik. Di masa pandemi ini, auditor BPK khususnya, sigap

mengeluarkan peraturan-peraturan terbaru terkait pelaksanaan audit agar terlaksana dengan baik. Tidak hanya itu, banyak auditor internal yang mulai menggunakan *remote auditing*.

Remote auditing merupakan pelaksanaan audit oleh auditor secara jarak jauh. Pelaksanaan ini sama seperti pelaksanaan audit pada umumnya hanya saja dilakukan melalui daring. Di masa krisis karena Covid-19 ini, auditor harus dapat menunjukkan banyak kontribusi dalam meningkatkan dan lebih melindungi nilai-nilai audit (Setianto, 2020). Dari sinilah, mahasiswa dapat mempelajari dan beradaptasi dari situasi yang sedang terjadi. Dengan demikian, mahasiswa dapat membaca peluang dan mengambil keputusan yang tepat disituasi apapun.

B. Maksud dan Tujuan PKL

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, adapun maksud dan tujuan praktikan melaksanakan PKL di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

1. Maksud dari pelaksanaan PKL, yaitu:
 - a. Mempraktikan ilmu dan teori mata kuliah akuntansi yang telah didapat selama diperkuliahan pada dunia kerja.
 - b. Mempelajari suatu bidang dalam pekerjaan khususnya di bidang akuntansi.
 - c. Mempelajari dan melakukan penerapan pada etika profesi akuntan di dunia kerja.

- d. Memenuhi mata kuliah PKL yang menjadi salah satu persyaratan untuk lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Negeri Jakarta.
2. Tujuan dari pelaksanaan PKL, yaitu:
 - a. Mendapat wawasan dan juga pengalaman di bidang akuntansi dan bidang ilmu lainnya yang mendukung pelaksanaan PKL.
 - b. Memberikan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam dunia kerja khususnya bagian akuntansi.
 - c. Meningkatkan pengetahuan yang didapat dari penerapan etika kerja yang sesuai dengan aturan kerja di lingkungan pekerjaan.
 - d. Memberikan gambaran kegiatan usaha yang dilakukan pada dunia kerja sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang sebenarnya.

C. Kegunaan PKL

Ada beberapa manfaat yang dapat didapatkan selama melaksanakan program PKL, baik dirasakan oleh praktikan pribadi, bagi Universitas Negeri Jakarta, maupun bagi perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL itu sendiri, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

1. Kegunaan Bagi Praktikan
 - a. Menambah dan mengukur pengetahuan kemampuan diri bagi praktikan mengenai ilmu, wawasan, dan perkembangan kinerja praktikan khususnya di bidang Akuntansi untuk kemudian hari dapat menjadi bekal persiapan praktikan di dunia kerja yang sebenarnya.
 - b. Praktikan dapat menjadi mahasiswa yang memiliki etos kerja yang sesuai dengan tuntutan profesi.

- c. Membangun suatu kerja sama yang baik dalam membangun relasi dan hubungan kerja dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
2. Kegunaan Bagi Universitas Negeri Jakarta
 - a. Memberikan kesan dan citra baik universitas kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan menunjukkan kualitas mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta kepada dunia kerja untuk memberikan hubungan kerja yang baik dikemudian hari bagi Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan tempat dilaksanakannya PKL.
 - b. Sarana bagi universitas untuk mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar lebih menyempurnakan kualitas program pendidikan agar selaras dengan kebutuhan yang diperlukan di dunia kerja saat ini.
 - c. Mendapatkan peluang yang besar bagi lulusan fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta untuk bekerja maupun melakukan berbagai kegiatan dengan perusahaan tempat PKL dilaksanakan.
3. Kegunaan Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
 - a. Menumbuhkan hubungan yang dinamis dan baik antara pihak Universitas Negeri Jakarta tempat dimana praktikan menimba ilmu dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
 - b. Membantu meringankan beban pekerjaan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.

D. Tempat PKL

Berikut ini adalah informasi singkat dimana praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan:

jenis lembaga : Instansi Pemerintahan

nama instansi : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210

telepon : (021) 255 49000

e-mail : eppid@bpk.go.id

website : <https://www.bpk.go.id/>

Praktikan memilih Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tempat praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan. Hal ini dikarenakan BPK RI merupakan suatu lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Menurut pasal I Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara.

Selain itu, BPK RI cocok bagi praktikan untuk lebih memperdalam ilmu akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan dalam mengelola keuangan. Di BPK RI praktikan ditempatkan di bagian unit kerja Biro Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

E. Jadwal Waktu PKL

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 2 bulan atau minimum 40 hari kerja. PKL dilaksanakan oleh praktikan pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020. Dalam melaksanakan PKL, ada beberapa tahapan yang praktikan lalui, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Berikut ini merupakan rincian tahap pelaksanaan PKL:

1. Tahap Persiapan

Di tahap persiapan ini, praktikan mencari informasi-informasi yang tersedia dari berbagai *website* dan laman di internet juga *social media*. Setelah mendapatkan informasi, praktikan menghubungi pihak Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional untuk bertanya mengenai persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk melamar PKL. Lalu praktikan membuat surat permohonan PKL dan ditujukan kepada bagian tim *Human Resources Development* pada bagian kemahasiswaan secara *online* melalui *Whatsapp*. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak ada aktivitas kampus sementara. Selama menunggu surat permohonan, praktikan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, diantaranya membuat proposal untuk permintaan PKL, transkrip nilai, dan membuat *curriculum vitae*. Pada tanggal 17 Juli 2020, surat permohonan PKL dikirimkan oleh pihak BAKHUM ke *e-mail* praktikan setelah pengisian form beberapa hari yang lalu. Kemudian praktikan mengirimkan semua persyaratan administrasi yang diminta oleh pihak Biro Humas dan Kerja

Sama Internasional melalui *e-mail* resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada hari Jum'at, tepat pada tanggal 28 Agustus, praktikan menerima Nota Dinas dan Surat Tanggapan atas Permohonan Praktik Kerja Lapangan sehubungan dengan penerimaan praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang dimulai pada tanggal 1 September 2020 dan berakhir pada 30 Oktober 2020 atau terhitung 44 hari kerja.

Dikarenakan pandemi Covid-19, praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan secara *Full Work From Home*, hal ini berkaitan dengan aturan yang dilaksanakan pada bagian praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Praktikan ditempatkan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Praktikan dibimbing oleh Ibu Wiwin Adhi Tama selaku Staf pada bagian Biro Keuangan di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Meskipun praktikan melaksanakan *Full WFH*, praktikan tetap mengikuti jadwal kerja pada BPK RI, yaitu dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.30 WIB. Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan diberikan daftar hadir yang disediakan oleh pihak Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional serta praktikan juga mengisi daftar hadir yang disediakan oleh fakultas. Praktikan juga mengisi setiap kegiatan yang dilakukan oleh praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

Pada akhir masa Pelaksanaan Kerja Lapangan, praktikan membuat laporan magang untuk persyaratan dalam melengkapi berkas-berkas yang akan dinilai dan ditandatangani oleh pihak Biro Keuangan.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, praktikan menyusun laporan yang dimulai dari bulan Oktober hingga November. Dalam penulisan laporan, praktikan dibimbing oleh Bapak Adam Zakaria, S.E., Akt, M. Ak., Ph.D selaku dosen pembimbing Praktik Kerja Lapangan agar isi laporan dapat dijelaskan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Data untuk membuat laporan ini berupa data yang dikumpulkan praktikan saat sedang menjalani tugas selama PKL berlangsung.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Perusahaan



Gambar II. 1: Logo BPK RI.

Sumber: jakarta.bpk.go.id

Dilansir dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI <https://www.bpk.go.id/menu/sejarah>, Sejarah pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, tepatnya tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Magelang dan diketuai pertama kali oleh R. Soerasno. Pada tanggal 6 November 1948, Badan Pemeriksa Keuangan berpindah dari Magelang ke Yogyakarta, hal ini tertuang dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948. Saat itu ketuanya diwakili oleh R. Kasirman terhitung mulai 1 Agustus 1949 berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950.

Berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, dibentuklah Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara RIS yang bkedudukan di Bogor dan diketuai oleh R. Soerasno mulai 31 Desember 1949. Dewan Pengawas Keuangan RIS ini menempati bekas kantor *Algemeen Rekenkamer* pada masa pemerintah *Netherland Indies Civil Administration (NICA)*.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 1 Oktober 1950 berdasarkan UUDS 1950. Namun, 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan kembali UUD Tahun 1945, dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUDS 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan agar menjadi alat kontrol yang efektif yang dikemukakan dalam Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963, pada tanggal 12 Oktober 1963 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. Untuk mengganti PERPU tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 1965 yang menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang

kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Lalu, Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.

Kedudukan BPK RI akhirnya dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara oleh MPRS dengan Ketetapan No. X/MPRS/1966. Sehingga perlu merubah UU yang mendasari tugas BPK RI dan akhirnya dapat terealisasi pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Di era Reformasi sekarang, kedudukan BPK RI diperkuat oleh dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan pada Tahun 2002 sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan perlu memantapkan agar menjadi lembaga yang independen dan profesional. Maka dari itu, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD 1945 diamandemen guna memantapkan tugas BPK RI. Sebelum amandemen, BPK RI diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5), setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Dasar Hukum BPK RI

Keberadaan badan yang akan melakukan fungsi pemeriksaan telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yang dinyatakan bahwa untuk

memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 23 Bab VIII UUD 1945).

Undang-undang pertama kali yang mengikuri amanat UUD 1945 baru terbit tahun 1973. Kedudukan konstitusional BPK RI dinyatakan sebagai “Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas pemerintah” (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973).

Dilansir pada website resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI https://www.bpk.go.id/menu/dasar_hukum, Sejak tanggal 9 November 2001, landasan hukum BPK RI sesuai dengan Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Bab VIII A Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G.

Pasal 23 E

- a. Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri bertugas untuk memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara.
- b. Sesuai kewenangannya, hasil dari pemeriksaan keuangan negara tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Setelah itu, lembaga perwakilan dan/atau badan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 23 F

- a. Dewan Perwakilan Rakyat memilih Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden.
- b. Anggota memilih Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23 G

- a. Badan Pemeriksa Keuangan berlokasi di ibu kota negara dan memiliki perwakilan-perwakilan di setiap provinsi di Indonesia.
- b. Informasi dan ketentuan lainnya lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang yang berlaku.

Visi BPK RI

Dilansir dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI https://www.bpk.go.id/menu/visi_misi, terdapat visi dan misi yang menjadi target Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan negara

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.”

Misi BPK RI

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tujuan Strategis BPK RI

Ada dua tujuan strategis dalam memastikan tercapainya visi dan misi, yaitu:

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan

2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.

Nilai-Nilai Dasar

Dalam mencapai cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPK RI, maka dari itu terdapat tiga nilai-nilai dasar yaitu sebagai berikut:

- a. Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

- b. Independensi

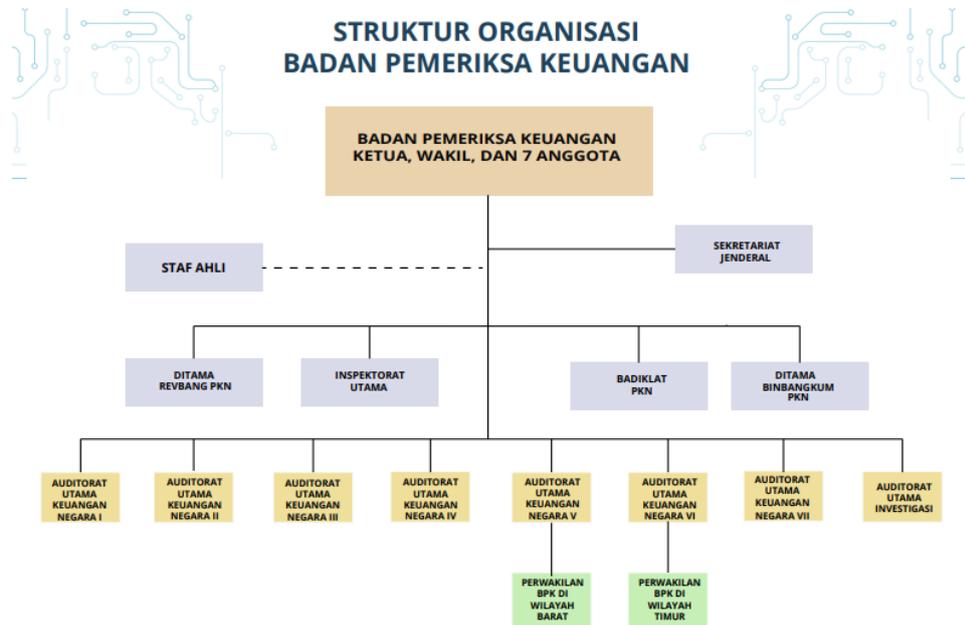
Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

- c. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

B. Struktur Organisasi

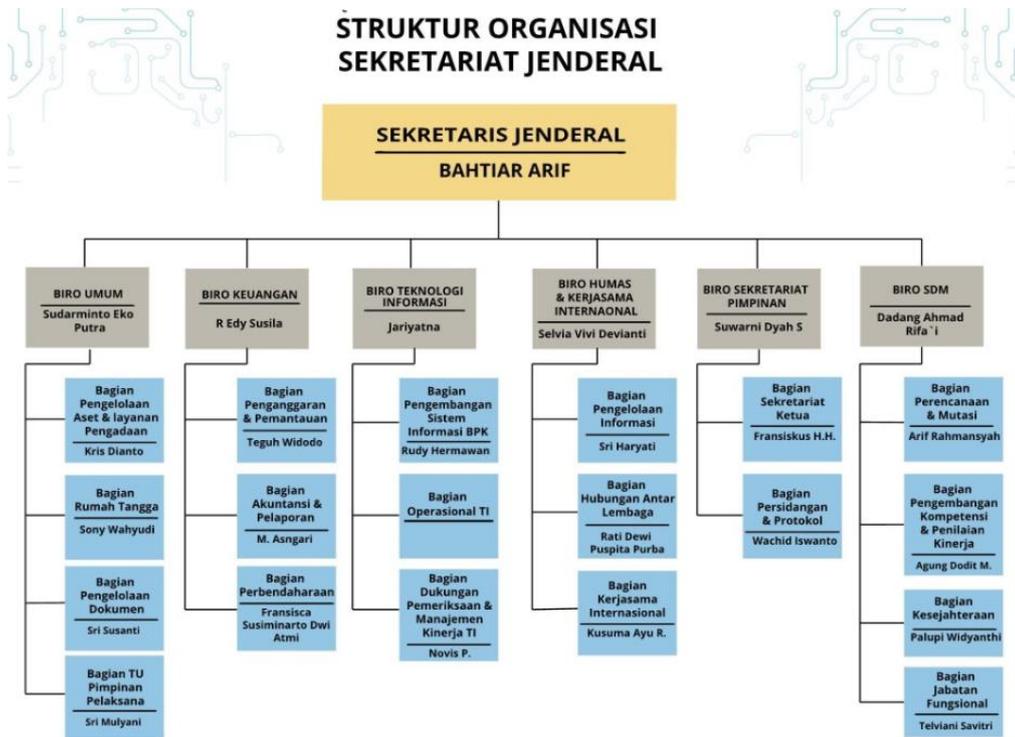
Dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK RI adalah sebagai berikut:



Gambar II. 2: Struktur Organisasi BPK RI.

Sumber: bpk.go.id/menu/struktur_organisasi

Praktikan ditempatkan untuk melaksanakan PKL di Sekretariat Jenderal yang dikepalai oleh Bapak Bahtiar Arif. Bagian Sekretariat Jenderal terdiri dari Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Humas & Kerjasama Internasional, Biro Sekretariat Pimpinan dan Biro SDM, dapat dilihat pada Gambar II.3 dibawah ini.



Gambar II. 3: Struktur Organisasi Sekretaris Jenderal

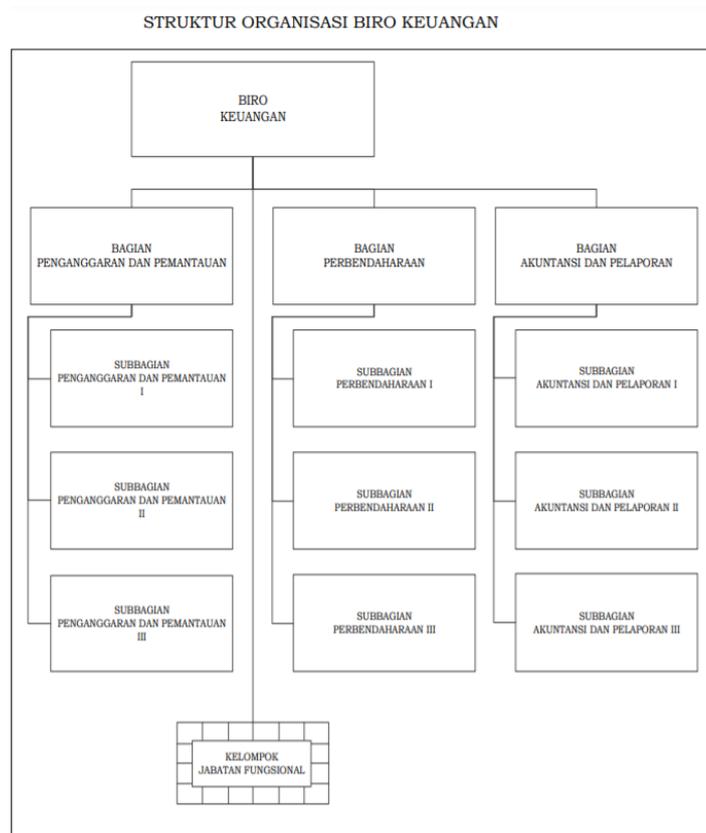
Sumber: bpk.go.id/menu/struktur_organisasi

Praktikan melaksanakan PKL dikhususkan di Bagian Akuntansi dan Pelaporan pada Biro Keuangan, yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Asngari selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan. Pada bagian ini, praktikan melaksanakan tugas menelaah dan menganalisa laporan keuangan yang akan dibimbing oleh pembimbing PKL yaitu dengan Ibu Wiwin Adhi Tama selaku staff pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan.

Biro Keuangan terdiri atas Bagian Penganggaran dan Pemantauan, Bagian Perbendaharaan, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan yang di mana merupakan tempat praktikan melaksanakan tugas PKL.

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Keuangan mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan mengevaluasi rencana aksi yang akan dilakukan Biro Keuangan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Merumuskan rencana kegiatan yang dilakukan Biro Keuangan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Keuangan;
3. Merumuskan kebijakan pada bidang penganggaran berdasarkan rencana dari kegiatan Pelaksana BPK;
4. Merumuskan kebijakan pada bidang perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan; Perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
5. Merumuskan bagaimana bahan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara;
6. Melaksanakan kebijakan pada bidang penganggaran; pelaksanaan kebijakan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;
7. Menyusun Laporan Keuangan BPK;
8. Melaksanakan dan mengelola risiko pada lingkup tugas Biro Keuangan;
9. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan; dan
10. Melaporkan hasil dari kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.



Gambar II. 4: Struktur Organisasi Biro Keuangan BPK RI.

Sumber: Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan

Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, Biro Keuangan merupakan salah satu bagian dari Sekretariat Jenderal yang mempunyai bagian-bagian lain dibawahnya. Seperti yang sudah dilampirkan pada Gambar II.3, Biro Keuangan terdiri atas Bagian Penganggaran dan Pemantauan, Bagian Perbendaharaan, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Secara spesifik, praktikan ditempatkan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan. Berikut keterangan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Penganggaran dan Pemantauan

Menurut pasal 67 dan 68, Bagian Penganggaran dan Pemantauan mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK dan memantau pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK. Fungsi Bagian Penganggaran dan Pemantauan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan kebijakan pada bidang penganggaran dan pemantauan dalam pelaksanaan anggaran;
- b. Melakukan pelaksanaan kebijakan pada bidang penyusunan anggaran yang berdasarkan rencana kegiatan dari Pelaksana BPK;
- c. Melakukan tindakan pemantauan pada pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK;
- d. Melakukan penyiapan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- e. Melakukan penyiapan bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan.

Menurut pasal 69 dan 70, pada bagian Penganggaran dan Pemantauan terdiri atas beberapa subbagian, yaitu:

- a. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I.

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran, serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Sekretariat Jenderal (termasuk Museum BPK RI), Inspektorat Utama,

Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Staf Ahli, AKN I sampai dengan AKN VII, dan Auditorat Utama Investigasi.

b. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II.

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran, serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan BPK Perwakilan wilayah barat, serta melakukan kompilasi atas bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran tingkat lembaga.

c. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III.

Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan dan pelaporan realisasi anggaran, serta menyiapkan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup BPK Perwakilan wilayah timur serta melakukan kompilasi atas pemantauan realisasi anggaran tingkat lembaga.

2. Bagian Perbendaharaan

Menurut pasal 71 dan 72, Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan kegiatan perbendaharaan di lingkungan BPK Pusat. Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan kebijakan untuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang perbendaharaan;
- b. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan di lingkungan BPK Pusat;
- c. Melakukan penyiapan data perbendaharaan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- d. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola Anggaran dan Bendahara; dan
- e. Melakukan penyiapan bahan untuk kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan.

Menurut pasal 73 dan 74, khususnya pada bagian Perbendaharaan terdiri atas beberapa subbagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Subbagian Perbendaharaan I.

Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pengusulan uang persediaan, perencanaan dan pengelolaan kas serta pengembalian belanja, dan penyetoran pajak milik BPK ke kas negara berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satuan kerja di BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.

- b. Subbagian Perbendaharaan II.

Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pengujian dokumen tagihan, evaluasi atas rincian anggaran biaya, dan pengelolaan uang muka berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan

perbendaharaan bagi satuan kerja di BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.

c. Subbagian Perbendaharaan III.

Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memantau pencetakan dokumen, peng-input-an data Surat Perintah Membayar, dan data perbendaharaan ke dalam aplikasi dan Sistem Informasi Keuangan, serta pengelolaan belanja pegawai berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satuan kerja di BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien.

3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Menurut pasal 75 dan 76, Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengolahan data akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan BPK. Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Melakukan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara;
- c. Melakukan pelaksanaan rekonsiliasi Akuntansi Barang Milik Negara;
- d. Melakukan penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan.

Menurut pasal 77 dan 78, khususnya pada bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas beberapa subbagian, yaitu sebagai berikut:

a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada lingkup Sekretariat Jenderal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.

b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada lingkup Inspektorat Utama, Ditama Binbangkum, Ditama Revbang, Staf Ahli, AKN I sampai dengan AKN VII, dan Auditorat Utama Investigasi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK.

c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas mengolah data akuntansi dan melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada lingkup BPK Perwakilan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Museum BPK RI dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK dan melakukan kompilasi atas laporan keuangan tingkat lembaga.

C. Kegiatan Umum Instansi

Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan satu-satunya lembaga yang disebut sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas dan mempunyai wewenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan Negara Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 1 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, undang-undang memberikan BPK kebebasan serta kemandirian, oleh karena itu, BPK sendiri juga merupakan suatu lembaga negara yang mandiri dan bebas (Abdi, 2019).

Tugas utama BPK RI sangat besar dan mempunyai ruang lingkup yang luas. Tugas utama Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah bertugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga ataupun badan lain yang bertugas mengelola keuangan negara.

Tugas utama pada Biro Akuntansi dan Pelaporan adalah mengolah data akuntansi dan menyusun laporan keuangan BPK RI Perwakilan. Pemeriksaan ini berdasarkan pada pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan Keuangan BPK Perwakilan ini diserahkan kepada DPR, DPRD, dan DPD, serta laporan tertulis diserahkan kepada Presiden dan Gubernur. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan ini bermanfaat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

BAB III

PELAKSANAAN PKL

A. Bidang Kerja

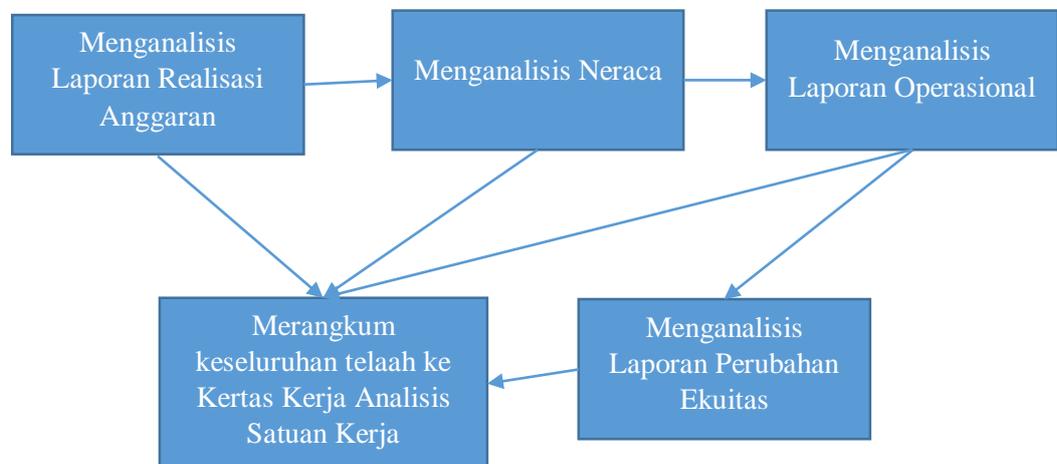
Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan diberi tanggung jawab untuk ditempatkan pada bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan BPK RI. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Pasal 75 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan BPK RI mempunyai tugas melakukan pengolahan data akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan BPK.

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan secara daring (*online*) dengan metode WFH (*Work From Home*). Hal ini didasari oleh peraturan yang diberikan dari Kepala Biro Keuangan agar mengantisipasi menularnya Covid-19 di lingkungan kerja. Meskipun mengerjakan Praktik Kerja Lapangan secara daring, praktikan tetap mengerjakan tugas dengan maksimal dan penuh tanggung jawab meskipun tidak bisa mengakses beberapa sistem aplikasi karena tidak dapat diakses selain di kantor. Praktikan juga sangat terbantu dengan penentuan jam yang fleksibel untuk diskusi bersama Ibu Wiwin Adhi Tama selaku pembimbing praktikan dalam melaksanakan PKL.

Bidang pekerjaan yang diberikan kepada praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan adalah menganalisis Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020, menganalisis Laporan Keuangan Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, menganalisis Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020. Adapun prosesnya dibagi menjadi 5 tahap dan digambarkan pada bagan dibawah ini:

1. Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran
2. Menganalisis Neraca
3. Menganalisis Laporan Operasional
4. Menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas
5. Merangkum keseluruhan telaah ke Kertas Kerja Satuan Kerja.



Bagan III. 1: Proses Menelaah Laporan Keuangan BPK RI secara general.

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020.

Praktikan menerima laporan keuangan dan lampiran-lampiran pendukung yang dikirimkan oleh pembimbing PKL melalui *e-mail* dengan format file pdf. Lampiran-lampiran utama maupun pendukung sudah tersedia di dalam laporan

keuangan masing-masing. Praktikan mengerjakan telaah dengan menggunakan *Microsoft Excel*. Saat membandingkan, praktikan hanya menggunakan file *Excel* yang berisi Formulir Analisa dan Laporan Keuangan dengan format pdf.

B. Pelaksanaan Kerja

Praktikan ditempatkan pada bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan BPK RI dan dibimbing oleh Ibu Wiwin Adhi Tama selaku staff Biro Keuangan BPK RI. Praktikan mulai melaksanakan PKL pada tanggal 01 September 2020 pukul 08.00 sampai 16.30 WIB.

Sebelum melaksanakan PKL dan diberi tugas secara mendetail, praktikan diberikan kesempatan selama 1 minggu untuk membaca Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Setelah membaca PMK, pembimbing PKL praktikan menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana pengaplikasian PMK tersebut pada tugas yang akan diberikan kepada praktikan.

Dalam menelaah laporan keuangan pemerintahan, terdapat 4 laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Urutan menelaah diawali dari Laporan Realisasi Anggaran dan berlanjut urut sampai Laporan Perubahan Ekuitas. Setelah semua sudah ditelaah pada form analisa masing-masing, selanjutnya dirangkum pada Kertas Kerja Telaah Satuan Kerja BPK RI.

Dalam menelaah laporan keuangan, satuan kerja BPK RI membandingkan saldo-saldo melalui beberapa aplikasi, yaitu aplikasi SIMAK BMN, ADK SAIBA, aplikasi Persediaan, dan aplikasi *e-Reckon*.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi instansi yang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari satker pada bagian atau seksi perlengkapan yang sesuai dengan struktur Unit Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.



Gambar III. 1: Aplikasi SIMAK BMN

Sumber: <http://bmn.unej.ac.id/?p=271>

ADK adalah kepanjangan dari arsip data komputer yang didalamnya berisi data transaksi, data buku besar, dan lainnya. Data-data ini harus dikirim ke aplikasi *e-reckon*. Dilansir dari website resmi Kementerian Hukum dan HAM (<https://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/index-berita-humas/dengan-e-rekon-memudahkan-pekerjaan-penyusun-laporan-keuangan-kppn#:~:text=E%2DRekon%20dan%20LK%20adalah,Direktorat%20Jenderal%20Perbendaharaan%20Kementerian%20Keuangan>) aplikasi *e-reckon* adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data keuangan dan penyusunan LK K/L.

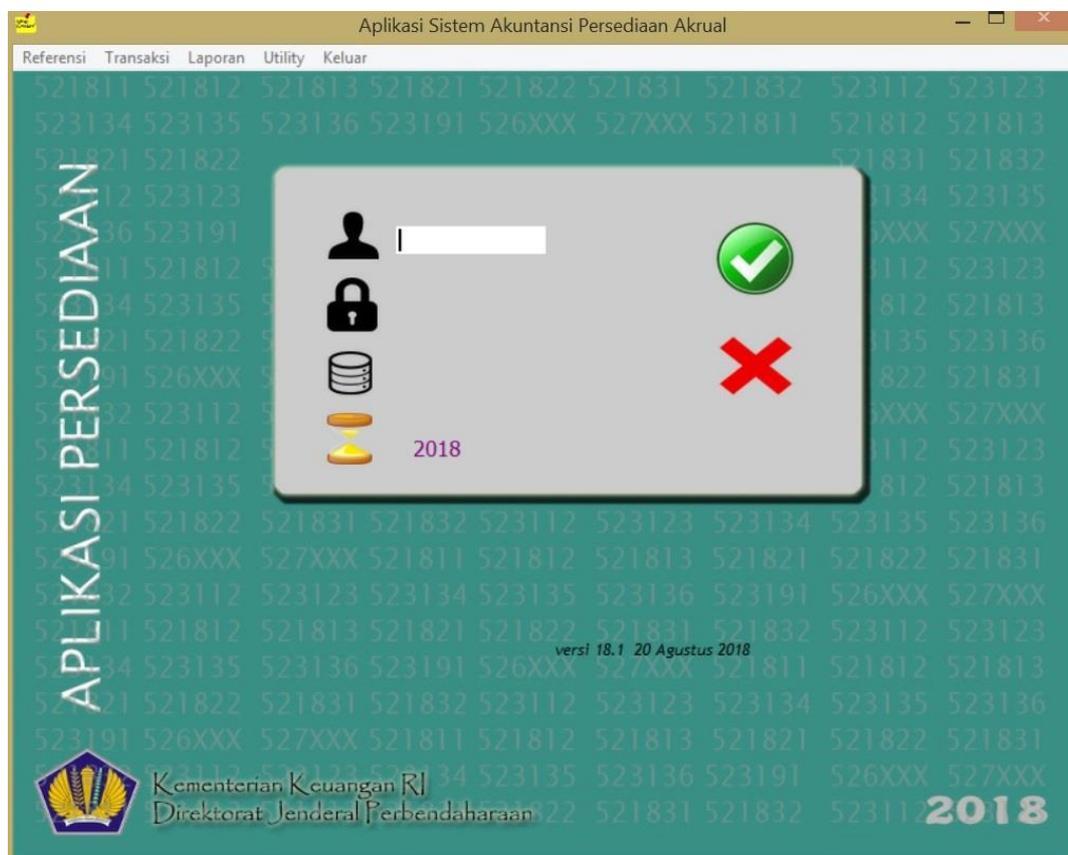


Gambar III. 2: Aplikasi E-Reckon

Sumber: Website resmi Inspektorat Jenderal Kemenkumham

Lalu definisi aplikasi persediaan yang dilansir melalui website resmi BMN
BMKG

(<https://bmn.bmkg.go.id/persediaan/#:~:text=Aplikasi%20Persediaan%20adalah%20sistem%20aplikasi,dikembangkan%20oleh%20Direktorat%20Jenderal%20Perbendaharaan>) mempunyai definisi yaitu sistem aplikasi yang diperuntukan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan tujuan memudahkan pengelolaan stok barang persediaan guna keperluan operasional kantor. Aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.



Gambar III. 3: Aplikasi Persediaan

Sumber: Website resmi BMN BMKG

Dikarenakan praktikan melakukan pekerjaan secara *full work from home*, praktikan tidak bisa mengakses beberapa sistem informasi yang tersedia, yaitu aplikasi SIMAK BMN, aplikasi ADK SAIBA aplikasi Persediaan, dan aplikasi

e-Reckon. Lalu ada beberapa pernyataan yang tertulis pada analisis *form* tidak dapat ditelaah karena keterbatasan dokumen yang diberikan, namun hal ini tidak terlalu mempengaruhi hasil telaah yang dikerjakan oleh praktikan.

Penjelasan tugas-tugas secara rinci yang diberikan oleh pembimbing kepada praktikan dalam melaksanakan PKL pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan BPK RI adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran.

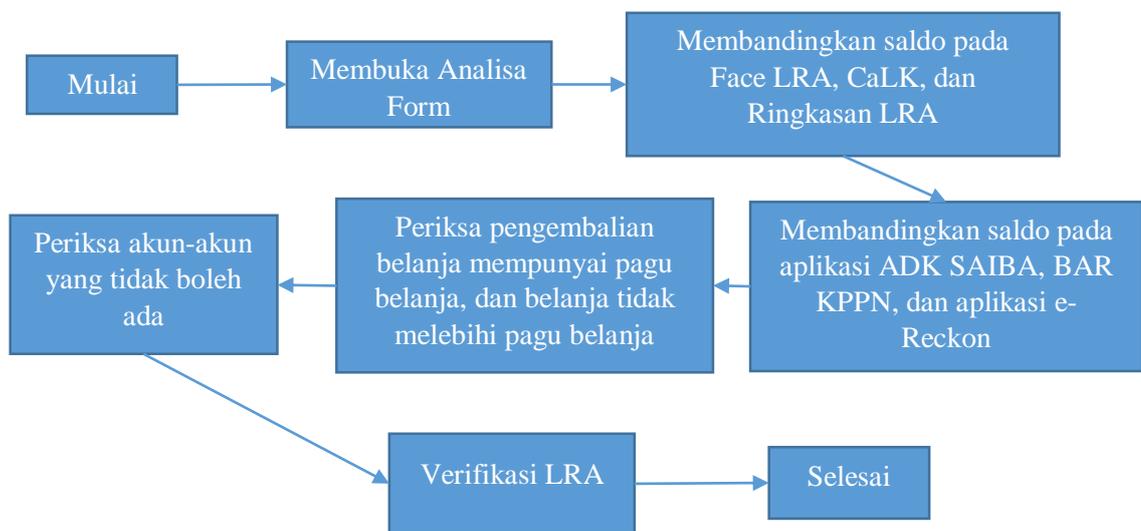
Hal pertama yang dilakukan oleh praktikan dimulai dengan menelaah atau menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA). merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi-informasi berkaitan dengan pendapatan-LRA, belanja yang dilakukan, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang bersumber dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi pada LRA berfungsi bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi laporan untuk mengambil keputusan mengenai bagaimana alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2019).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

- a. Pendapatan-LRA
 - 1) Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA
- b. Belanja-LRA
 - 1) Belanja Operasi

- a) Belanja Pegawai
 - b) Belanja Barang
- 2) Belanja Modal
- a) Belanja Tanah
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin
 - c) Belanja Gedung dan Bangunan
 - d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - e) Belanja Modal Lainnya

Proses dalam menelaah Laporan Realisasi Anggaran yang digambarkan pada Bagan III.1 dapat dirincikan seperti Bagan III.2 dibawah ini.



Bagan III. 2: Proses Menelaah Laporan Realisasi Anggaran

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020.

Langkah pertama, praktikan membuka Analisis *Form* Laporan Realisasi Anggaran yang diberikan oleh pembimbing PKL (Lampiran 9). *Form* tersebut berisi bagaimana langkah-langkah dalam membandingkan saldo-saldo yang ada

pada Laporan Realisasi Anggaran di laporan keuangan yang akan ditelaah. Analisa *Form* ini merupakan acuan awal praktikan dalam menelaah Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020, Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, dan Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020.

Setelah itu, praktikan membandingkan saldo yang terdapat pada *Face* LRA (Lampiran 10) dengan Catatan atas Laporan Keuangan LRA (Lampiran 11). Saldo-saldo yang dibandingkan pada tahap awal ini adalah saldo nilai estimasi pendapatan dan saldo nilai pagu DIPA. Untuk membandingkan saldo nilai realisasi pendapatan dan saldo nilai realisasi belanja dibandingkan pada *Face* LRA, Catatan atas Laporan Keuangan LRA, dan bandingkan dengan saldo pada Ringkasan LRA (Lampiran 12). Lalu keempat saldo yang sudah disebutkan tadi dibandingkan dengan beberapa aplikasi, yaitu ADK SAIBA, Berita Acara Realisasi Pendapatan KPPN dan aplikasi *e-Reckon*. Namun, dikarenakan praktikan tidak dapat mengakses aplikasi *e-Reckon* dikarenakan *work from home*, praktikan hanya membandingkan saldo melalui output aplikasi ADK SAIBA dan Berita Acara Realisasi Pendapatan KPPN (Lampiran 13) saja. Untuk aplikasi ADK SAIBA, dikarenakan praktikan tidak bisa mengakses karena WFH, pembimbing PKL menyarankan alternatif untuk melihat Neraca Percobaan Akrual (Lampiran 14) sebagai pembanding. Proses ini dilakukan pada ketiga Laporan Keuangan tersebut, kecuali, pada Laporan Keuangan Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020 terdapat output ADK SAIBA (Lampiran 16), sehingga praktikan dapat memeriksa melalui hasil output tersebut.

Setelah selesai membandingkan, praktikan memeriksa apakah semua pengembalian belanja mempunyai pagu belanja, dan apakah semua belanja saldonya tidak melebihi pagu belanja. Untuk pertanyaan ini, hasil pada ketiga Laporan Keuangan setelah diperiksa hasilnya sudah tepat.

Lalu praktikan memeriksa apakah ada akun-akun yang seharusnya tidak boleh ada, yaitu akun Pendapatan dan Perpajakan, akun Pendapatan Bunga Lainnya, akun Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu, akun Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu, akun Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu, akun Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu, akun Pendapatan Hibah, akun Pendapatan Badan Layanan Umum, akun Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum, dan akun Belanja Modal Badan Layanan Umum. Setelah praktikan memeriksa pada Neraca Percobaan Akrua (Lampiran 14), tidak ditemukan akun-akun yang disebutkan diatas pada ketiga Laporan Keuangan tersebut.

Langkah terakhir dalam menelaah LRA, praktikan melakukan verifikasi LRA, yaitu praktikan kembali memastikan beberapa pernyataan sebagai berikut:

1. Saldo estimasi masing-masing jenis pendapatan sudah sama pada CaLK LRA dan *Face* LRA.

Pada ketiga Laporan Keuangan, nilai estimasi masing-masing jenis pendapatan sudah sesuai pada CaLK LRA dan *Face* LRA.

2. Saldo pagu masing-masing jenis belanja sudah sama pada CaLK LRA dan *Face* LRA.

Pada ketiga Laporan Keuangan, nilai estimasi masing-masing saldo pagu jenis belanja sudah sesuai pada CaLK LRA dan *Face* LRA.

3. Saldo realisasi masing-masing jenis pendapatan sudah sama pada CaLK LRA dan *Face* LRA.

Pada ketiga Laporan Keuangan, nilai realisasi masing-masing saldo jenis pendapatan sudah sesuai pada CaLK LRA dan *Face* LRA.

4. Saldo realisasi masing-masing jenis belanja sudah sama pada CaLK LRA dan *Face* LRA.

Pada ketiga Laporan Keuangan, nilai realisasi masing-masing saldo pagu jenis belanja sudah sesuai pada CaLK LRA dan *Face* LRA.

5. Perhitungan persentase sisa anggaran yang terdapat pada akun-akun LRA pada CaLK LRA sudah benar.

Pada Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020 dan Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020, persentase sisa anggaran yang terdapat pada akun-akun LRA pada CaLK LRA sudah dihitung oleh praktikan dan hasilnya sudah benar. Namun, pada Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, terdapat koreksi pada presentase realisasi belanja pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

6. Perhitungan persentase kenaikan dan penurunan yang terdapat pada akun-akun LRA pada CaLK LRA sudah benar.

Pada Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020, perhitungan persentase kenaikan dan penurunan yang terdapat pada akun-akun LRA pada CaLK LRA sudah dihitung oleh praktikan dan hasilnya sudah benar. Namun, pada Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 terdapat koreksi, yaitu terdapat kesalahan penulisan persentase penurunan pada Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2019. Terdapat juga kesalahan pada Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020, yaitu tidak dicantumkannya saldo penurunan dan persentase penurunan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tabel 18 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30 September 2019 (Lampiran 18).

7. Terdapat realisasi belanja barang yang dikapitalisasikan ke Aset Tetap yang sudah diungkapkan ke dalam CaLK LRA pada sub bagian CaLK Belanja Barang (Lampiran 11.1) sudah benar.

Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020 dan Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2019, tertulis pada CaLK LRA bahwa terdapat Realisasi Belanja Barang (52) Semester I TA 2020 yang dikapitalisasi ke aset tetap dan telah diungkapkan dengan benar. Sedangkan pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020, tidak terdapat Realisasi Belanja Barang (52) Triwulan III Tahun 2020 yang dikapitalisasi ke aset tetap.

8. Angka yang diungkapkan dalam CaLK LRA sama dengan angka saldo yang terdapat pada Lampiran Kertas Kerja Analisa Belanja (Lampiran 15) dan CaLK Akun Aset Tetap (lampiran 11.3) serta CaLK Aset Tak Berwujud (Lampiran 11.4) yang berasal dari Realisasi Belanja Barang (52) tersebut pada CaLK Neraca.

Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020, angka yang diungkapkan dalam CaLK LRA sama dengan angka saldo yang terdapat pada Lampiran Kertas Kerja Analisa Belanja dan CaLK Akun Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang berasal dari Realisasi Belanja Barang (52) tersebut pada CaLK Neraca.

Kapitalisasi ke Aset Tetap tersebut berupa Kapitalisasi Peralatan dan Mesin Intrakomptabel dan Penambahan dari Belanja Barang pada CaLK akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 terdapat koreksi yaitu terdapat kesalahan penulisan saldo pada Kapitalisasi Peralatan dan Mesin. Namun pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020, tidak

ada kapitalisasi aset maka tidak ada angka yang diungkapkan dalam CaLK LRA dan tidak ada angka saldo yang terdapat pada Lampiran Kertas Kerja Analisa Belanja dan CaLK Akun Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang berasal dari Realisasi Belanja Barang (52).

9. Terdapat Analisa Belanja Modal yang diungkapkan dalam CaLK LRA pada sub bagian CaLK Belanja Modal (Lampiran 11.2) yang sudah benar.

Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020 dan Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, praktikan tidak menemukan saldo Belanja Modal atau Nihil. Dengan demikian, tidak terdapat belanja modal pada Semester I Tahun 2020 per 30 Juni 2020 dan Tahun 2019.

Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020, terdapat saldo pada Analisa Belanja Modal dan sudah diungkapkan dengan benar dalam CaLK LRA pada sub bagian CaLK Belanja Modal.

10. Terdapat realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap, jika ada, hal tersebut harus diungkapkan dalam CaLK LRA pada sub bagian CaLK Belanja Modal (Lampiran 11.2) dan angka yang diungkapkan pada CaLK LRA sama dengan angka yang diungkapkan pada Lampiran Kertas Kerja Analisa Belanja dan CaLK akun Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang tidak dikapitalisasi tersebut pada CaLK Neraca.

Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020 sudah disebutkan bahwa tidak terdapat belanja

modal. Hal ini dikarenakan pada Semester I Tahun 2020, Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum mengalokasikan secara khusus belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini diungkapkan pada CaLK sub bagian CaLK Belanja Modal.

Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, tidak terdapat belanja modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap.

Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020, tidak terdapat belanja modal karena pada Tahun 2020 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19.

2. Menganalisis Neraca.

Setelah praktikan menelaah Laporan Realisasi Anggaran, langkah selanjutnya adalah menelaah Laporan Neraca Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pada akuntansi pemerintahan, Neraca adalah komponen dari laporan keuangan yang menggambarkan bagaimana posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2019).

Komponen akun-akun yang terdapat pada Laporan Neraca Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

- c. Aset

1) Aset Lancar

- a) Kas di Bendahara Pengeluaran
- b) Kas Lainnya dan Setara Kas
- c) Belanja Dibayar di Muka
- d) Piutang Bukan Pajak
- e) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih—Piutang Bukan Pajak
- f) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
- g) Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
- h) Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
- i) Persediaan

2) Aset Tetap

- a) Tanah
- b) Peralatan dan Mesin
- c) Gedung dan Bangunan
- d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e) Aset Tetap Lainnya
- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

d. Piutang Jangka Panjang

e. Aset Lainnya

1) Aset Tak Berwujud

2) Aset Lain-Lain

3) Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

f. Kewajiban

1) Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang kepada Pihak Ketiga

b) Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

c) Pendapatan Diterima di Muka

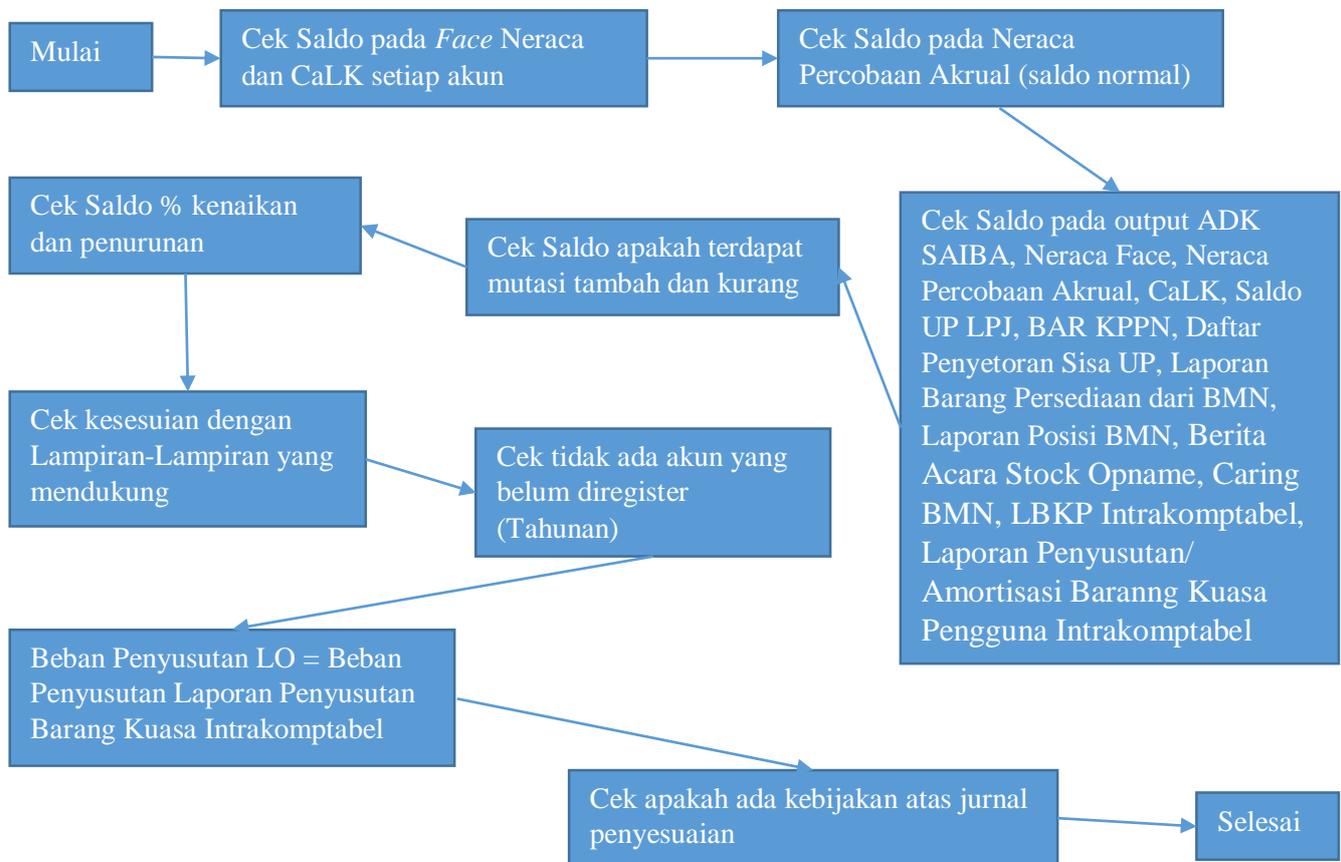
d) Uang Muka dari KPPN

e) Utang Jangka Pendek Lainnya

g. Ekuitas

1) Ekuitas

Langkah-langkah dalam menganalisa atau menelaah laporan neraca adalah dimulai dari membuka *Form* Analisa Laporan Neraca (Lampiran 19) yang diberikan oleh pembimbing PKL. Pada *form* tersebut terdapat klasifikasi per akun yang akan ditelaah. Akun-akun yang ditelaah pada Laporan Neraca berjumlah 17 bagian, yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya, Piutang Bukan Pajak, Penyisihan Piutang, Belanja Dibayar di Muka, Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi, Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan Pendapatan Diterima di Muka. Proses menelaah keseluruhan akun dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



Bagan III. 3: Proses Menelaah Laporan Neraca secara umum.

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menelaah neraca adalah membuka Analisa *Form* tiap akun yang ingin ditelaah, selanjutnya membandingkan saldo pada *Face* Neraca (Lampiran 21) dengan CaLK Neraca (Lampiran 20) pada setiap akun. Lalu, bandingkan saldo tersebut pada Neraca Percobaan Akrual apakah akun tersebut bersaldo normal dan tidak ada *null*.

Langkah selanjutnya, praktikan membandingkan saldo pada Output SAIBA, Neraca *Face*, Neraca Percobaan Akrual, Calk pada akun tersebut, dan beberapa lampiran tambahan yang akan diperjelas dibawah ini:

1. **Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya**, pada proses ini, saldo-saldo yang sudah dibandingkan dengan dokumen-dokumen diatas dibandingkan lagi dengan Lampiran Saldo UP di LPJ Bendahara Pengeluaran (Lampiran 22) untuk Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya, serta Daftar Penyetoran Sisa UP yang disetor pada Tahun Sebelumnya (Lampiran 23) untuk Kas di Bendahara Pengeluaran.
2. **Persediaan**, pada saat menelaah persediaan, bandingkan saldo yang sudah dibandingkan dengan dokumen-dokumen diatas dengan Laporan Barang Persediaan dari BMN (Lampiran 24), Laporan Posisi BMN (Lampiran 25), Berita Acara Stock Opname (Lampiran 26), dan Caring BMN (Lampiran 27).
3. **Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Aset Tak Berwujud**, untuk bagian akun-akun ini, setelah membandingkan saldo dengan dokumen-dokumen yang disebutkan diatas, selanjutnya bandingkan dengan Laporan Posisi BMN, Caring BMN, dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel (Lampiran 28).
4. **Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi**, untuk bagian akun ini, bandingkan dengan Caring BMN, Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel (Lampiran 29), dan Laporan Amortisasi Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel (Lampiran 30).

Setelah itu, periksa apakah terdapat mutasi tambah atau kurang pada setiap akun-akun yang ditelaah dan juga periksa apakah sudah disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan setiap akun yang ditelaah. Selanjutnya periksa

kebenaran persentase kenaikan dan penurunan pada akun-akun yang ditelaah, jika sudah, periksa kesesuaian dengan lampiran-lampiran yang mendukung diantaranya Kartu Piutang/ Lampiran Daftar Rekapitulasi Piutang Bukan Pajak (Lampiran 31) untuk menelaah Piutang Bukan Pajak; Lampiran Kartu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Lampiran 32) untuk menelaah Penyisihan Piutang; Kertas Kerja Saldo Belanja Dibayar di Muka (Lampiran 33) untuk menelaah Belanja Dibayar di Muka; Kertas Kerja Pembelian Persediaan (Lampiran 34) untuk menelaah Persediaan; Status Tanah (Lampiran 35) untuk melihat deskripsi tentang akun Tanah; Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka (Lampiran 36) untuk menelaah Pendapatan Diterima di Muka; dan Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap A1 (Lampiran 37) dan Rincian Nilai Koreksi-Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan A1.a (Lampiran 38) untuk menelaah akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan akun Amortisasi.

Langkah selanjutnya adalah periksa apakah terdapat akun-akun yang belum diregister, akun-akun tersebut ialah Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Koreksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tak Berwujud.

Lalu praktikan memeriksa saldo pada Beban Penyusutan LO harus sama dengan saldo pada Beban Penyusutan pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Intrakomptabel, hal ini berlaku pada akun Penyusutan dan Amortisasi termasuk memeriksa Penyusutan Aset Lain-Lain. Langkah terakhir ialah memeriksa apakah ada Jurnal Penyesuaian yang terdapat pada akun-akun yang ditelaah.

Saat menelaah, praktikan menemukan beberapa koreksi pada akun-akun yang ditelaah, diantaranya dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan	Akun	Koreksi
Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Semester I Tahun 2020	- Piutang Bukan Pajak	Terdapat koreksi pada persentase penurunan.
	- Penyisihan Piutang	Terdapat koreksi pada persentase penurunan.
	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Terdapat koreksi yang sudah praktikan hitung pada Caring BMN, yaitu terdapat kesalahan pencatatan saldo.
	- Aset Lain-Lain	Terdapat koreksi pada persentase penurunan.
	- Utang pada Pihak Ketiga	Terdapat koreksi pada persentase penurunan.
Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2019	- Piutang Bukan Pajak	Terdapat koreksi pada pencatatan nominal saldo Mutasi Tambah yang berada pada CaLK.
	- Persediaan	Terdapat koreksi pada persentase penurunan.
	- Tanah	Terdapat koreksi pada persentase kenaikan.
	- Aset Tetap Lainnya	Terdapat koreksi pada persentase kenaikan.
	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Terdapat koreksi pada persentase kenaikan.
	- Aset Lain-Lain	Terdapat koreksi pada persentase kenaikan.

	- Pendapatan Diterima di Muka	Terdapat koreksi pada persentase penurunan.
Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020	- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Terdapat koreksi pada persentase.
	- Aset Lain-Lain	Terdapat koreksi pada persentase kenaikan.
	- Utang kepada Pihak Ketiga	Terdapat koreksi pada perhitungan persentase penurunan dan tidak dicatatnya nominal penurunan pada CaLK Utang kepada Pihak Ketiga.

Tabel III. 1: Koreksi pada akun-akun masing-masing Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan.

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020

Pada tabel diatas terdapat beberapa koreksi yang terjadi saat praktikan menelaah akun-akun pada Laporan Neraca, adapun penjelesan lebih lanjut mengenai akun tersebut sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Semester I Tahun 2020

a. Koreksi pada persentase.

Pada akun Piutang Bukan Pajak, Penyisihan Piutang, Aset Lain-Lain dan Utang kepada Pihak Ketiga terdapat koreksi pada kesalahan penulisan persentase penurunan pada CaLK akun-akun tersebut. Kesalahan ini ditemukan praktikan saat menghitung ulang persentase kenaikan dan penurunan di CaLK akun-akun tersebut.

b. Koreksi pada pencatatan.

Pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdapat koreksi pada kesalahan pencatatan nominal saldo pada Catatan Ringkas BMN. Kesalahan ini ditemukan saat praktikan menghitung ulang jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

2. Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2019

a. Koreksi pada persentase.

Pada akun Persediaan, Tanah, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Aset Lain-Lain, dan Pendapatan Diterima di Muka terdapat koreksi pada kesalahan penulisan persentase kenaikan dan persentase penurunan pada akun Persediaan. Kesalahan ini ditemukan oleh praktikan saat menghitung ulang persentase kenaikan dan penurunan pada CaLK akun-akun tersebut.

b. Koreksi pada pencatatan.

Pada akun Piutang Bukan Pajak terdapat koreksi kesalahan pencatatan saldo Mutasi Tambah yang terdapat pada Lampiran Caring BMN. Praktikan menemukan kesalahan ini dengan membandingkan CaLK Piutang Bukan Pajak dengan Caring BMN.

3. Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020

a. Koreksi pada persentase.

Pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain terdapat koreksi kesalahan penulisan persentase kenaikan. Kesalahan ini

ditemukan oleh praktikan saat menghitung ulang persentase kenaikan dan penurunan pada CaLK akun-akun tersebut.

b. Koreksi pada pencatatan.

Pada akun Utang Pihak Ketiga terdapat kesalahan penulisan persentase penurunan dan tidak dicatatnya nominal saldo penurunan. Kesalahan ini ditemukan oleh praktikan pada CaLK Utang kepada Pihak Ketiga.

Dari koreksi ketiga Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan diatas yang sudah dijelaskan, kesalahan terbanyak terdapat pada kesalahan penulisan persentase. Meskipun hanya berbeda 0,001% saja, hal ini tetap menjadi fokus penelaah dalam memeriksa kesalahan. Praktikan diajarkan oleh pembimbing PKL untuk menjaga sikap ketelitian dan hati-hati saat menelaah Laporan Keuangan yang ditugaskan kepada praktikan.

Ada beberapa akun yang memiliki keunikan tersendiri. Selama menelaah, praktikan mempelajari akun-akun mana saja yang memiliki ketentuan dan aturan tersendiri. Adapun diantaranya ialah:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

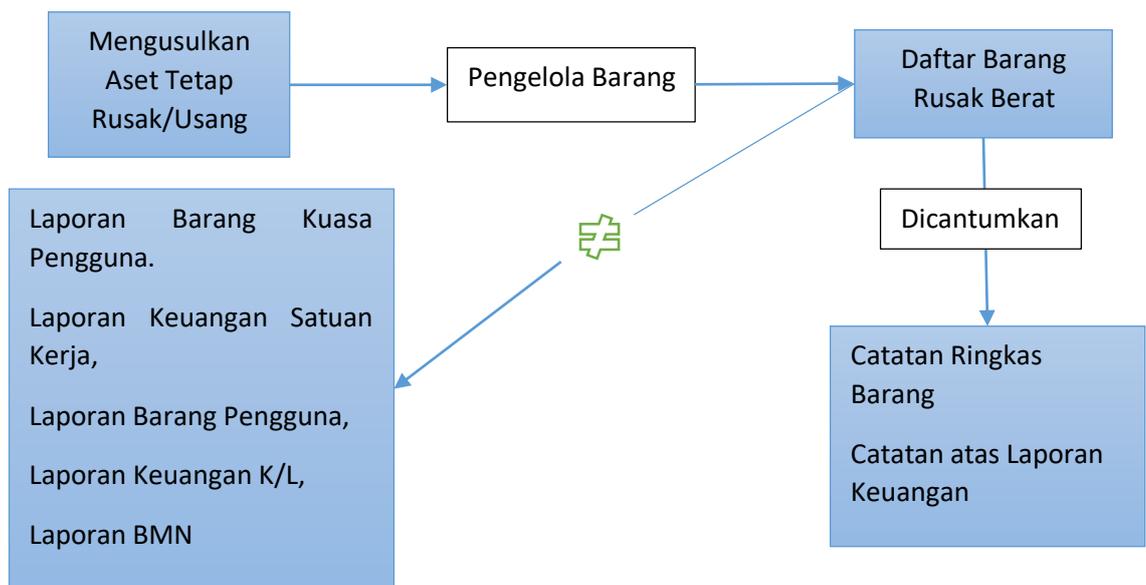
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja yang berupa uang persediaan yang diterima dan dikelola oleh bendahara pengeluaran serta harus dipertanggungjawabkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pengeluaran yang dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/satuan kerja (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2019).

Dalam menelaah akun ini diperlukan lampiran Daftar Penyetoran sisa UP dan Saldo UP di LPJ Bendahara Pengeluaran. UP atau Uang Persediaan adalah saldo uang muka kerja yang dikelola oleh bendahara pengeluaran untuk pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja dan harus dipertanggungjawabkan. Pada Laporan Keuangan Tahunan, saldo UP yang berada pada LPJ akan bersaldo Rp0, karena uang persediaan ini harus disetor ke kas negara setiap akhir tahun, dokumen LPJ Tahunan dapat dilihat pada Lampiran 22.1, begitu pula Daftar Penyetoran Sisa UP, pada Laporan Keuangan Tahunan, akan terlihat jumlah saldo yang akan disetor ke kas negara, dokumen ini dapat dilihat pada Lampiran 23.1. Lain halnya dengan Laporan Keuangan Semester atau Triwulan, karena masih akan terdapat saldo UP pada Kas di Bendahara Pengeluaran karena belum disetor ke kas negara.

2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain adalah akun yang digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Aset Tidak Berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dengan kata lain, aset yang diakui ke dalam Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Contohnya seperti penghentian penggunaan dari Aset Tak Berwujud yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau tidak digunakan karena menunggu proses pemindahtanganan atau proses

penjualan, sewa beli, penghibahan, dan lain-lain (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2019).



Bagan III. 4: Proses Penghapusan Aset Tetap

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020

Terdapat proses dalam kegiatan penghapusan aset yang akan diakui pada akun Aset Lain-Lain. Langkah pertama dalam penghapusan aset adalah aset yang dalam kondisi rusak berat atau usang diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, lalu akan direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan tidak akan dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan K/L, Laporan BMN dan LPP serta akan diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan CaLK. Selanjutnya, jika Keputusan

Penghapusan sudah disetujui dan diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.

3. Pendapatan Diterima di Muka

Pada saat menelaah akun ini, praktikan menghitung langsung benar atau salahnya jumlah nominal saldo Pendapatan Diterima di Muka. Perhitungan yang dilakukan praktikan lampirkan pada Lampiran 48.1 dan Lampiran 48.2 pada lembar lampiran di akhir laporan.

4. Aset Tetap dan Persediaan

Aset Tetap yang dimaksud adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Pada akun-akun Aset Tetap ini, tidak diperbolehkan adanya akun Aset Tetap yang Belum Diregister pada Laporan Keuangan Tahunan, sedangkan diperbolehkan pada Laporan Keuangan Semesteran dan Triwulan dengan menjelaskan penyebabnya pada CaLK. Hal ini sesuai dengan aturan terbaru Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI pada tanggal 30 September 2020.

Dilansir dari website resmi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro (<http://kppnmetro.org/2015/10/solusi-persediaan-belum-diregister-pada-neraca/>) Akun yang belum diregister ini tidak diperbolehkan ada jika ditelaah pada Laporan Keuangan Tahunan. Akun ini disebabkan diantaranya oleh:

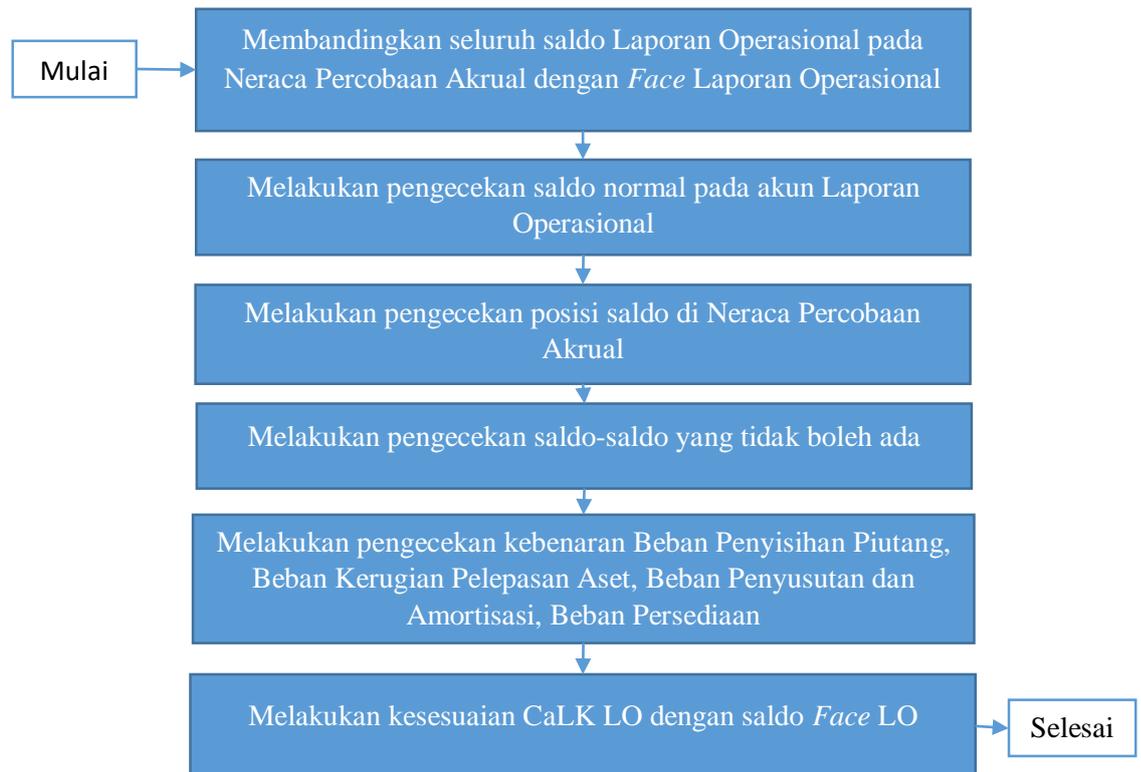
- a. Aplikasi SIMAK/Persediaan salah input nilai rupiah

- b. Aplikasi Persediaan salah kode barang.
- c. Hibah dalam bentuk barang.
- d. Salah input akun.

3. Menganalisis Laporan Operasional.

Setelah menelaah Laporan Neraca, selanjutnya praktikan menelaah Laporan Operasional pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Laporan Operasional merupakan komponen pada laporan keuangan yang memberikan informasi terkait dengan seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang dicerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional yang berasal dari suatu entitas pelaporan. LO juga memberikan laporan mengenai transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2019).

Dalam menelaah Laporan Operasional hanya memerlukan 1 Analisa Form karena sudah mewakili seluruh akun-akun yang berada pada Laporan Operasional, khususnya pada Face Laporan Operasional (Lampiran 41). Berikut bagan proses menelaah Laporan Operasional yang dibuat oleh praktikan.



Bagan III. 5: Proses menelaah Laporan Operasional.

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020

Langkah pertama, praktikan membandingkan saldo Laporan Operasional pada Face Laporan Operasional dengan saldo pada Neraca Percobaan Akrual (Lampiran 43). Setelah itu, praktikan melakukan pengecekan saldo normal pada akun Laporan Operasional. Praktikan harus memastikan seluruh nilai normal akun LO adalah positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang dapat bernilai negatif. Praktikan memeriksa proses ini pada CaLK LO (Lampiran 42), lalu mencocokkan dan mengisis Analisa Form LO (Lampiran 40). Selanjutnya, praktikan melakukan pengecekan posisi saldo pada Neraca Percobaan Akrual. Yang harus dicek adalah akun Pendapatan bersaldo Kredit, kecuali Pengembalian Pendapatan, akun Beban bersaldo Debit, kecuali Beban

Penyisihan Piutang, dan akun Pengembalian Beban bersaldo Kredit. Untuk proses ini, pada ke-3 Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi tidak ditemukan adanya kesalahan.

Selanjutnya, praktikan memeriksa akun-akun yang tidak boleh ada, yaitu akun Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Bunga Lainnya, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Anggaran Lain-Lain, Penerimaan Kembali Belanja TAYL, Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji, Pendapatan BLU, Pendapatan Hibah, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Transfer, Beban Lain-Lain, Beban Bantuan Sosial, Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat/Pemda, Beban Persediaan Bahan Baku, dan Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga. Dalam proses ini, praktikan tidak menemukan akun-akun yang disebutkan diatas pada Neraca Percobaan Akrual.

Lalu, praktikan memeriksa kebenaran Beban Penyisihan Piutang Laporan Operasional dengan cara mengurangi saldo akhir Penyisihan Piutang dengan saldo awal Penyisihan Piutang dan ditambah dengan saldo Penghapusan Piutang. Untuk kebenaran Beban Penyusutan dan Amortisasi didapatkan dengan membandingkan saldo pada Neraca Percobaan Akrual dengan Beban Penyusutan di Lampiran A.1 (Lampiran 37), Lampiran A.1a (Lampiran 38), serta Laporan Penyusutan Intrakomptabel (Lampiran 29) dan Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud (Lampiran 30). Saldo yang dibandingkan harus sama. Selanjutnya untuk memeriksa kebenaran Beban Persediaan adalah dengan membandingkan Beban Persediaan pada Laporan Persediaan (lampiran

24) dengan Neraca Percobaan AkruaI. Langkah terakhir, praktikan melanjutkan dengan menyesuaikan saldo CaLK LO dengan Face LO.

4. Menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas.

Langkah terakhir dalam menelaah Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi adalah menelaah Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan Perubahan Ekuitas adalah komponen dalam laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos pada ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang menambah dan/atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2019).

Sama halnya seperti LO, LPE hanya membutuhkan 1 macam Analisa Form saja. Berikut adalah bagan proses menelaah Laporan Perubahan Ekuitas yang dibuat oleh praktikan:



Bagan III. 6: Proses menelaah Laporan Perubahan Ekuitas.

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020

Dalam menelaah Laporan Perubahan Ekuitas pada ketiga Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka Analisa Form LPE (Lampiran 44), setelah itu membandingkan kesesuaian hubungan saldo, yaitu apakah nilai “Surplus/Defisit-LO” sama dengan Nilai “Surplus/Defisit-LO” di LPE, apakah saldo Ekuitas Akhir di LPE sama dengan saldo Ekuitas di Neraca, dan Jumlah Aset sama dengan jumlah keseluruhan Kewajiban ditambah Ekuitas. Pada proses ini, praktikan harus memastikan semua saldo telah berhubungan dan sama. Selanjutnya, praktikan menyesuaikan saldo awal dan saldo akhir pada Face LPE (Lampiran 45) dengan Neraca Percobaan Akrual dan CaLK LPE (Lampiran 46).

Lalu, praktikan memeriksa apakah ada akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, adakah akun Pos Penyesuaian Nilai Aset, adakah pos Koreksi Nilai Persediaan dan adalah akun Selisih Revaluasi Aset Tetap. Pada ketiga Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi, praktikan tidak menemukan akun-akun diatas pada CaLK LPE.

Selanjutnya, praktikan memeriksa akun Transaksi Antar Entitas. Pada proses ini, diperiksa apakah ada akun Diterima dari Entitas Lain atau akun Ditagihkan ke Entitas Lain dan apakah saldo tersebut sesuai dengan saldo Realisasi Pendapatan dan Belanja Netto LRA. Pada proses ini, saldo sudah sesuai. Setelah itu, praktikan memeriksa adakah Pos Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi, tetapi praktikan tidak menemukan adanya akun ini.

Langkah terakhir, praktikan memeriksa apakah ada akun Koreksi Lainnya dan apakah sudah disajikan dalam CaLK LPE. Pada proses ini, praktikan sudah memastikan bahwa terdapat akun tersebut dan sudah disajikan dengan benar.

5. Merangkum hasil keseluruhan ke dalam Kertas Kerja Satuan Kerja BPK RI.

Setelah menyelesaikan seluruh urutan menelaah laporan-laporan dimulai dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selanjutnya praktikan menginput hasil keseluruhan ke dalam Kertas Kerja Satuan Kerja BPK RI. Kertas Kerja Satker BPK RI untuk masing-masing Laporan Keuangan dapat dilihat pada Lampiran 47.1, Lampiran 47.2, dan Lampiran 47.3.

C. Kendala yang Dihadapi

Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan selama melaksanakan PKL, praktikan menghadapi beberapa kendala yang juga disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang sedikit menghambat PKL praktikan, yaitu:

1. Dikarenakan melaksanakan PKL melalui *full online*, praktikan sulit menguraikan penjelasan pertanyaan yang akan disampaikan kepada pembimbing PKL dan tidak bisa memperlihatkan beberapa dokumen yang ditanyakan.
2. Dikarenakan tidak bisa melaksanakan PKL di kantor dan mengoperasikan secara langsung, praktikan sulit memahami simulasi sistem dalam aplikasi SIMAK BMN, ADK SAIBA, dan aplikasi lainnya.

3. Ketika menganalisis laporan keuangan, terkadang ada beberapa dokumen yang tidak terlampir, praktikan menjadi tidak maksimal dalam menganalisis.

D. Cara Mengatasi Kendala

Meskipun terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan tetap melakukan berbagai cara agar kendala dapat teratasi dan dapat tercipta kegiatan PKL yang efektif dan efisien. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh praktikan dalam mengatasi kendala, yaitu:

1. Dalam mengatasi kendala terkait sulitnya menguraikan pertanyaan kepada pembimbing PKL, praktikan mengusulkan kepada pembimbing PKL untuk melakukan diskusi via *Whatsapp Call*. Hal ini praktikan lakukan agar praktikan dapat lebih mengerti dan dapat menjelaskan secara tepat kepada pembimbing PKL atas permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, praktikan juga selalu memberikan kabar setiap harinya terkait dengan jadwal kuliah yang praktikan lakukan. Hal ini membantu praktikan dan pembimbing PKL dalam menemukan waktu yang tepat untuk berdiskusi bersama meskipun melalui jarak jauh.
2. Dalam mengatasi kendala terkait kurangnya pengoperasian beberapa aplikasi, praktikan berusaha mendiskusikannya dengan pembimbing PKL dan bertanya bagaimana proses dalam pengoperasiannya. Dengan demikian, pembimbing PKL akan membuat sebuah simulasi yang ditulis di Ms.Word atau Ms.Excel tentang bagaimana alur dari proses pengoperasian aplikasi tersebut. Pembimbing PKL juga memberikan alternatif dokumen apa saja yang bisa diperiksa apabila tidak bisa memeriksa langsung melalui aplikasi tersebut.

3. Dalam mengatasi kendala dokumen-dokumen yang tidak terlampir, praktikan akan mendiskusikannya kepada pembimbing PKL dan mengikuti arahan pembimbing atas apa yang harus dilakukan selanjutnya.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktikan yang menjalankan PKL, fakultas, maupun BPK Republik Indonesia. Meskipun praktikan melaksanakan PKL pada saat masa pandemi Covid-19, praktikan diharapkan dapat memperoleh banyak ilmu-ilmu baru dan wawasan baru tentang dunia kerja.

Praktikan menyadari lingkungan praktikan saat berada di universitas sangat berbeda dengan lingkungan praktikan saat bekerja di tempat kerja praktikan. Praktikan harus mengedepankan kecermatan dalam memahami situasi, mengurangi risiko kesalahan kerja, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepada praktikan.

Praktikan sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PKL di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, karena praktikan mendapat banyak wawasan dan mendalami ilmu-ilmu baru mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Setelah praktikan melaksanakan kegiatan PKL dalam kurun waktu dua bulan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) maka kesimpulan yang dapat praktikan ambil yaitu:

1. Praktikan mendapatkan banyak pengetahuan mendalam mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, khususnya aturan-aturan yang berlaku pada BPK RI.

2. Praktikan mendapatkan pengalaman baru dalam mengambil keputusan dengan melihat berbagai aspek, situasi, dan kondisi.
3. Meskipun mengalami keterbatasan dikarenakan pandemi sehingga tidak bisa mengakses beberapa aplikasi, namun praktikan dapat mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik dan maksimal.
4. Praktikan dapat mengetahui bagaimana gambaran saat praktikan menghadapi dunia kerja yang sebenarnya di masa yang akan datang.
5. Praktikan mendapatkan banyak pembelajaran, salah satunya adalah dalam melakukan penyesuaian diri saat berada di lingkungan baru dan bersosialisasi dengan lingkungan baru tersebut.

B. Saran

Setelah praktikan melaksanakan PKL di BPK RI selama kurun waktu dua bulan atau 44 hari dan berdasarkan kesimpulan yang sudah praktikan jabarkan diatas, praktikan memberikan beberapa saran yang akan ditujukan baik untuk praktikan, Fakultas Ekonomi, dan bagi BPK RI. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Saran untuk Praktikan

- a. Praktikan perlu lebih mempersiapkan diri dimulai dengan mempelajari ilmu akuntansi pemerintahan terkait yang akan menjadi tugas praktikan selama praktik kerja lapangan berlangsung, agar praktikan dapat mengetahui bagaimana gambaran umum dan akan lebih siap dalam melaksanakan tugas sebelum melaksanakan PKL;

- b. Praktikan diharapkan lebih aktif lagi dan cekatan dalam melaksanakan tugas yang diberikan dan dalam mencari sebuah solusi dari kendala yang dihadapi; dan
- c. Praktikan perlu menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan pembimbing PKL maupun staf akuntansi lainnya selama melaksanakan praktik kerja lapangan.

2. Saran untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

- a. Diharapkan dapat selalu menjalin kerja sama dan hubungan yang baik dengan BPK RI maupun perusahaan atau instansi pemerintah lainnya agar dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa sebagai tempat melaksanakan kegiatan PKL;
- b. Memberikan bekal atau bimbingan pelatihan awal dan gambaran mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan sebelum mahasiswa melakukan kegiatan PKL; dan
- c. Karena terkendala pandemi, mungkin lebih baik lagi jika pemberitahuan tentang jadwal PKL lebih jelas dan tidak terkesan simpang siur, jadi mahasiswa dapat lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi.

3. Saran untuk Badan Pemeriksa Keuangan RI

- a. Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan, praktikan menyarankan agar pihak instansi menyiapkan bidang dan dokumen apa saja yang dapat menjadi pengganti akibat tidak tersedianya aplikasi untuk menunjang pemeriksaan Laporan Keuangan.

- b. Pihak instansi diharapkan memberikan bimbingan yang cukup jelas mengenai tugas yang akan dilakukan oleh praktikan sebelum praktikan melaksanakan PKL. Hal ini dilakukan agar praktikan memiliki persiapan materi dan lebih siap dalam melakukan PKL.
- c. Pihak instansi diharapkan memberikan 2 pembimbing PKL agar PKL dapat terlaksana dengan baik disaat pembimbing PKL lainnya sedang tidak bisa dijangkau melalui *Whatsapp*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Husnul. 2019. "Tugas Dan Fungsi BPK Yang Perlu Diketahui, Tanggung Jawab Soal Keuangan Negara." *Liputan6*.
[https://hot.liputan6.com/read/4063631/tugas-dan-fungsi-bpk-yang-perlu-diketahui-tanggung-jawab-soal-keuangan-negara#:~:text=Tugas dan fungsi BPK yang utama yaitu bertugas dalam memeriksa, lembaga atau badan lain yang \(November 11, 2020\).](https://hot.liputan6.com/read/4063631/tugas-dan-fungsi-bpk-yang-perlu-diketahui-tanggung-jawab-soal-keuangan-negara#:~:text=Tugas dan fungsi BPK yang utama yaitu bertugas dalam memeriksa, lembaga atau badan lain yang (November 11, 2020).)
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2020. "Visi BPK RI : Misi BPK RI :” *BPK RI*.
https://www.bpk.go.id/menu/visi_misi (November 11, 2020).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2020. "Dasar Hukum BPK RI.” *BPK RI*.
<https://jakarta.bpk.go.id/dasar-hukum-bpk-ri/#:~:text=Keberadaan badan yang akan yang,23 Bab VIII UUD 1945> (November 11, 2020).
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2019. "Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana BPK.”
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2020. "Peran Audit Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Mendorong Pembangunan Nasional.” *Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*. <https://www.bppt.go.id/layanan-informasi-publik/4069-peran-audit-teknologi-di-era-revolusi-industri-4-0-dalam-mendorong-pembangunan-nasional> (November 5, 2020).

Gamar, Nur, and Ali Djahhuri. 2015. "Auditor Internal Sebagai 'Dokter' Fraud."

Jurnal Akuntansi Multiparadigma 6(1): 1–174.

Kementerian Keuangan RI. 2020. "Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2020."

Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional. 2018.

"Pengembangan Iptek Dan Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 4.0."

Ristek-Brin. <https://www.ristekbrin.go.id/siaran-pers/pengembangan-iptek-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-industri-4-0/> (November 5, 2020).

Kurniawan, Robi Cahyadi. 2017. "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah." *Fiat Justisia* 10(3).

Novatiani, Ait, R. Wedi Rusmawan Kusumah, and Diandra Pepi Vabiani. 2019.

"Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* 10(1).

Peraturan Menteri Keuangan RI. 2019. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat."

Peraturan Pemerintah RI. 2010. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan." : Lampiran I.01 Kerangka Konseptual, Halaman 2.

Prabowo, Dory Sukma Wahyu. 2015. "Solusi 'Persediaan Belum Diregister' Pada Neraca SAIBA." *KPPN Metro*. <http://kppnmetro.org/2015/10/solusi-persediaan-belum-diregister-pada-neraca/> (November 18, 2020).

Raba', Mieke Rayu. 2017. "Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik Menurut UU No. 15 Tahun 2006." *Lex Crimen* 6(3).

Rere, Yanuaria Delciana. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 3(3).

Setianto, Hari. 2020. "Remote Auditing Dan Agilitiy: Kiat Auditor Menavigasi Pandemi." *Warta Ekonomi*.
<https://www.wartaekonomi.co.id/read288725/remote-auditing-dan-agility-kiat-auditor-menavigasi-pandemi> (November 6, 2020)

Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan."

Undang-Undang Republik Indonesia. 2019. "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi."

L
A
M
P
I
R
A
N

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon: Rektor : 4893854, WR.I : 4895130, WR.II : 4893918, WR.III : 4892926, WR.IV : 4893982
BUK : 4750930, Bag. Kepegawaian : 4890536, Bag. UHT : 4893726, Bag. BMN : 4891838
BAKHUM : 4759081, Bag. Akademik dan kerjasama / Humas : 4898486 Bag. Kemahasiswaan
Biro Keuangan : 4755118, Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Akuntansi dan Pelaporan : 4755118, Bag. Perencanaan : 4755118
Laman : www.unj.ac.id

Nomor : **4510/UN39.12/KM/2020**
Lamp. : **1 lembar**
Hal : **Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan**

15 Juli 2020

**Yth. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Jl. Gatot Subroto, Kav. 31, Jakarta Pusat, 16210**

Kami mohon kesediaan Ibu untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

N a m a : **Rahmatika Firmansyah**
Nomor Registrasi : 1706617021
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
No. Telp/HP : 085718444987

Untuk dapat mengadakan Praktek Kerja Lapangan pada tanggal 1 September 2020 s.d. 30 Oktober 2020 guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah.

Atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat

Woro Sasmoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi Akuntansi

Lampiran 2: Surat Penerimaan PKL



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp. (021) 25549000 Fax. (021) 5720909

Jakarta, 28 Agustus 2020

Nomor : 231/S/X.2/8/2020
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Permohonan Praktik Kerja Lapangan

Yth. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat
Universitas Negeri Jakarta
di
Jakarta

Menjawab surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Nomor 4510/UN39.12/KM/2020 hal permohonan praktik kerja lapangan mahasiswi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta atas nama **Rahmatika Firmansyah, No. Registrasi: 1706617021**, dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan dapat kami terima untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di unit kerja Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada September sampai dengan Oktober 2020.

Demikian tanggapan kami. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerja Sama Internasional,

Rati Dewi Puspita Purba, S.E., M.M.

Tembusan :
Sekretaris Jenderal BPK RI.

Lampiran 3: Nota Dinas

NOTA DINAS
Nomor. 1236/ND/X.2/8/2020

Kepada Yth. : Kepala Biro Keuangan
Dari : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Praktik Kerja Lapangan
Tempat, Tanggal : Jakarta, 28 Agustus 2020

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional untuk menerima dan melayani permohonan ijin riset/praktik kerja lapangan/magang, kami telah menerima surat dari Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta Nomor 4510/UN39.12/KM/2020 perihal permohonan praktik kerja lapangan mahasiswi Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta atas nama **Rahmatika Firmansyah, No. Registrasi: 1706617021.**

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan mahasiswi yang bersangkutan, kami mempertimbangkan penempatan praktik kerja lapangan mahasiswi dimaksud dilaksanakan di unit kerja Biro Keuangan pada September sampai dengan Oktober 2020.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon persetujuan Bapak menerima mahasiswi tersebut untuk melakukan praktik kerja lapangan di unit kerja Biro Keuangan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

**Plh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerja Sama Internasional,**



**Rati Dewi Puspita Purba
NIP. 196301211990032001**

Lampiran 4: Surat Penempatan Magang

**PENEMPATAN MAHASISWA/MAHASISWI
MAGANG**

BULAN : SEPTEMBER 2020

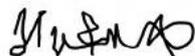
NO	NAMA	PERGURUAN TINGGI	JURUSAN	WAKTU
1.	Rahmatika Firmansyah	Universitas Negeri Jakarta	Akuntansi	September sampai dengan Oktober 2020

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/mahasiswi tersebut diatas akan melaksanakan magang dan ditempatkan pada unit kerja **Biro Keuangan**.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 7 September 2020

Yang menerima Mahasiswa/Mahasiswi
Magang



Wiwin Adhi Tama

Yang menyerahkan Mahasiswa/Mahasiswi
Magang



Subbagian Hubungan Lembaga
NonPemerintah
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional

Lampiran 5: Daftar Hadir PKL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
Laman www.fe.unj.ac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
..... SKS

Nama : Rahmatika Firmansyah
No. Registrasi : 1706617021
Program Studi : SI Akuntansi
Tempat Praktik : Badan Pemeriksa Keuangan RI
Alamat Praktik/Telp : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,
Jakarta Pusat / (021) 255 9000

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Selasa / 1 September 2020	1.	
2.	Rabu / 2 September 2020	2.	
3.	Kamis / 3 September 2020	3.	
4.	Jum'at / 4 September 2020	4.	
5.	Senin / 7 September 2020	5.	
6.	Selasa / 8 September 2020	6.	
7.	Rabu / 9 September 2020	7.	
8.	Kamis / 10 September 2020	8.	
9.	Jum'at / 11 September 2020	9.	
10.	Senin / 14 September 2020	10.	
11.	Selasa / 15 September 2020	11.	
12.	Rabu / 16 September 2020	12.	
13.	Kamis / 17 September 2020	13.	
14.	Jum'at / 18 September 2020	14.	
15.	Senin / 21 September 2020	15.	

Jakarta, 30 Oktober 2020
Penilai,



(...Wiwin Adhi Tama...)

Catatan:
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
Laman www.fe.unj.ac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
...2... SKS

Nama : Rahmatika Firmansyah
No. Registrasi : 170177021
Program Studi : SI AKUMANSI
Tempat Praktik : Badan Pemulisan Keuangan K-I
Alamat Praktik/Telp : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Pusat (021) 255 49000

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Selasa / 22 September 2020	1.	
2.	Rabu / 23 September 2020	2.	
3.	Kamis / 24 September 2020	3.	
4.	Jumat / 25 September 2020	4.	
5.	Senin / 28 September 2020	5.	
6.	Selasa / 29 September 2020	6.	
7.	Rabu / 30 September 2020	7.	
8.	Kamis / 1 Oktober 2020	8.	
9.	Jumat / 2 Oktober 2020	9.	
10.	Senin / 5 Oktober 2020	10.	
11.	Selasa / 6 Oktober 2020	11.	
12.	Rabu / 7 Oktober 2020	12.	
13.	Kamis / 8 Oktober 2020	13.	
14.	Jumat / 9 Oktober 2020	14.	
15.	Senin / 12 Oktober 2020	15.	

Jakarta, 30 Oktober 2020
Penilai,

(...Wiwin Adhi Tama...)

Catatan:
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
Laman www.fe.unj.ac.id

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
...2... SKS

Nama : Rahmatika Firmansyah
No. Registrasi : 1706617021
Program Studi : SI Akuntansi
Tempat Praktik : Badan Pemusatan Keuangan RI
Alamat Praktik/Telp : Jl. Jenderal Sudarto Kav. 51 Jakarta
Pusat / (021) 255 49.000

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Selasa / 13 Oktober 2020	1.	
2.	Rabu / 14 Oktober 2020	2.	
3.	Kamis / 15 Oktober 2020	3.	
4.	Jumat / 16 Oktober 2020	4.	
5.	Senin / 19 Oktober 2020	5.	
6.	Selasa / 20 Oktober 2020	6.	
7.	Rabu / 21 Oktober 2020	7.	
8.	Kamis / 22 Oktober 2020	8.	
9.	Jumat / 23 Oktober 2020	9.	
10.	Senin / 26 Oktober 2020	10.	
11.	Selasa / 27 Oktober 2020	11.	
12.	Rabu / 28 Oktober 2020	12.	
13.	Kamis / 29 Oktober 2020	13.	
14.	Jumat / 30 Oktober 2020	14.	
15.		15.	

Jakarta, 30 Oktober 2020
Penilai,



(..Wiwin Adhi.Tama...)

Catatan:
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 6: Absen Harian PKL untuk BPK RI



Absensi Harian Mahasiswa/Mahasiswi Magang Online
 Tingkat Perguruan Tinggi
 di Kantor Pusat BPK RI
 Bulan Sep-OKt 2020

Nama : Rahmatika Firmansyah
 Universitas : Universitas Negeri Jakarta
 Tempat Magang : Biro Keuangan
 Periode Magang : 1 September - 30 Oktober 2020

Tanggal	Paraf Mahasiswa/Mahasiswi	Paraf Pembimbing Ruangan	Keterangan
1/9/20			
2/9/20			
3/9/20		M. W. S. N. A.	
4/9/20			
7/9/20			
8/9/20			
9/9/20		M. W. S. N. A.	
10/9/20			
11/9/20			
14/9/20			
15/9/20			
16/9/20		M. W. S. N. A.	
17/9/20			
18/9/20			

Tanggal	Paraf Mahasiswa/Mahasiswi	Paraf Pembimbing Ruangan	Keterangan
21/9/20			
22/9/20			
23/9/20		M. W. S. N. A.	
24/9/20			
25/9/20			
28/9/20			
29/9/20		M. W. S. N. A.	
30/9/20			
1/10/20			
2/10/20			
5/10/20			
6/10/20			
7/10/20		M. W. S. N. A.	
8/10/20			
9/10/20			

Lampiran 7: Laporan PKL Mingguan untuk BPK RI

**FORMULIR LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN
MAGANG MAHASISWA**

Nama : Rahmatika Firmansyah
NIM : 1706617021
Program Studi : SI Akuntansi
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta
No HP : 085718444987 .

No.	Kegiatan	Waktu	Progres Hasil
1	Membaca PMK 212 dan PMK 225	1 sept - 4 sept 2020	100 %
2	Menganalisis LRA dan Neraca	7 sept - 11 sept 2020	50 %
3	Menganalisis Neraca	14 sept - 18 sept 2020	100 %
4	Menganalisis LO, LPE, & Kertas Kerja	21 sept - 25 sept 2020	75 %
5	Menganalisis LRA & Neraca	28 sept - 2 okt 2020	40 %
6	Menganalisis LRA & Neraca	5 okt - 9 okt 2020	100 %
7	Menganalisis LO, LPE, & Kertas Kerja Telaah	12 okt - 16 okt 2020	100 %
8	Menganalisis LRA & Neraca	19 okt - 23 okt 2020	100 %
9	Membuat Laporan PKL dan mengurus adm.	26 okt - 30 okt 2020	100 %

Jakarta, 7 September 2020

Peserta Magang


Rahmatika...F...

Lampiran 8: Rincian Kegiatan PKL

LOG HARIAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : Rahmatika Firmansyah
 No. Registrasi : 1706617021
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Tempat Praktik : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Pembimbing	
1	Selasa, 1 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan dengan unit kerja Biro Keuangan Akuntansi dan Pelaporan. 2. Pemaparan tentang Materi SAP dan dasar-dasar yang perlu diketahui sebelum melaksanakan pekerjaan. 	Ibu Wiwin	WFH
2	Rabu, 2 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Materi SAP, berisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Modul Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat. 2. Mempelajari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. 3. Berdiskusi secara tanya jawab dengan pembimbing PKL. 	Ibu Wiwin	WFH
3	Kamis, 3 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat. 2. Berdiskusi secara tanya jawab dengan pembimbing PKL. 	Ibu Wiwin	WFH
4.	Jumat, 4 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdiskusi secara tanya jawab tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Modul Jurnal Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat via Telfon <i>Whatsapp</i>. 	Ibu Wiwin	WFH
5	Senin, 7 September 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengarahan Magang oleh Biro Humas & Kerja Sama Internasional BPK RI. 	Bu Devi	Kantor BPK RI Pusat
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Berdiskusi membahas penerapan jurnal akuntansi pada Akun Persediaan, Akun Jurnal Anggaran, dan Akun Belanja Anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 3. Membahas bagaimana cara menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020. 4. Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Satuan 	Ibu Wiwin	WFH

		Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.		
6	Selasa, 8 September 2020	1. Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.	Ibu Wiwin	WFH
7	Rabu, 9 September 2020	1. Menganalisis dan mendiskusikan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020. 2. Membahas bagaimana cara menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.	Ibu Wiwin	WFH
8	Kamis, 10 September 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.	Ibu Wiwin	WFH
9	Jumat, 11 September 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.	Ibu Wiwin	WFH
10	Senin, 14 September 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.	Ibu Wiwin	WFH
11	Selasa, 15 September 2020	1. Menyelesaikan Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020. 2. Berdiskusi terkait akun Koreksi Lainnya dan akun Pendapatan Diterima Dimuka.	Ibu Wiwin	WFH
12	Rabu, 16 September 2020	1. Mendalami materi terkait akun Koreksi Lainnya dan akun Pendapatan Diterima Dimuka melalui Peraturan Menteri Keuangan. 2. Berdiskusi via Whatsapp Chat.	Ibu Wiwin	WFH
13	Kamis, 17 September 2020	1. Mendalami materi terkait akun Koreksi Lainnya dan akun Pendapatan Diterima Dimuka melalui Peraturan Menteri Keuangan. 2. Berdiskusi via Whatsapp Chat.	Ibu Wiwin	WFH
14	Jumat, 18 September 2020	1. Mendalami materi terkait akun Koreksi Lainnya dan akun Pendapatan Diterima Dimuka melalui Peraturan Menteri Keuangan. 2. Berdiskusi via Whatsapp Chat.	Ibu Wiwin	WFH
15	Senin, 21 September 2020	1. Menganalisis Laporan Operasional Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK	Ibu Wiwin	WFH

		Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.		
16	Selasa, 22 September 2020	1. Menganalisis Laporan Operasional Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.	Ibu Wiwin	WFH
17	Rabu, 23 September 2020	1. Menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.	Ibu Wiwin	WFH
18	Kamis, 24 September 2020	1. Menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.	Ibu Wiwin	WFH
19	Jumat, 25 September 2020	1. Mengisi Kertas Kerja Telaah Keseluruhan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 30 Juni 2020.	Ibu Wiwin	WFH
20	Senin, 28 September 2020	1. Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH
21	Selasa, 29 September 2020	1. Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH
22	Rabu, 30 September 2020	1. Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH
23	Kamis, 1 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH
24	Jumat, 2 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH
25	Senin, 5 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH
26	Selasa, 6 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH
27	Rabu, 7 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH

28	Kamis, 8 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Operasional Laporan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH
29	Jumat, 9 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Operasional Laporan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH
30	Senin, 12 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019 2. Menganalisis Kertas Kerja Analisis Keseluruhan Satuan Kerja Laporan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019	Ibu Wiwin	WFH
31	Selasa, 13 Oktober 2020	1. Menganalisis Kertas Kerja Analisis Keseluruhan Satuan Kerja Laporan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Periode 31 Desember 2019 2. Diskusi mengenai Pengelolaan BMN	Ibu Wiwin	WFH
32	Rabu, 14 Oktober 2020	1. Membandingkan Surat Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III tahun 2020 dengan PMK 212 dan 225	Ibu Wiwin	WFH
33	Kamis, 15 Oktober 2020	1. Membandingkan Surat Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III tahun 2020 dengan PMK 212 dan 225	Ibu Wiwin	WFH
34	Jumat, 16 Oktober 2020	1. Membandingkan Surat Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III tahun 2020 dengan PMK 212 dan 225	Ibu Wiwin	WFH
35	Senin, 19 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Laporan Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Triwulan III 30 September 2020	Ibu Wiwin	WFH
36	Selasa, 20 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Triwulan III 30 September 2020	Ibu Wiwin	WFH
37	Rabu, 21 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Triwulan III 30 September 2020	Ibu Wiwin	WFH
38	Kamis, 22 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Neraca Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan	Ibu Wiwin	WFH

		Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Triwulan III 30 September 2020		
39	Jumat, 23 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Operasional Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Triwulan III 30 September 2020	Ibu Wiwin	WFH
40	Senin, 26 Oktober 2020	1. Menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Triwulan III 30 September 2020 2. Menganalisis Kertas Kerja Analisis Keseluruhan Satuan Kerja Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Triwulan III 30 September 2020	Ibu Wiwin	WFH
41	Selasa, 27 Oktober 2020	1. Mengerjakan Laporan Magang 2. Mempersiapkan administrasi selesai magang	Ibu Wiwin	WFH
42	Rabu, 28 Oktober 2020	1. Mengerjakan Laporan Magang 2. Mempersiapkan administrasi selesai magang	Ibu Wiwin	WFH
43	Kamis, 29 Oktober 2020	1. Mengerjakan Laporan Magang 2. Mempersiapkan administrasi selesai magang	Ibu Wiwin	WFH
44	Jumat, 30 Oktober 2020	1. Mengerjakan Laporan Magang 2. Mempersiapkan administrasi selesai magang	Ibu Wiwin	WFH

Jakarta, 30 Oktober 2020

Penilai



 Wiwin Adhi Tama

Lampiran 9: Form Analisis LRA

Form Analisa_LRA_2020 - Microsoft Excel

Microsoft account

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Clipboard Font Alignment Merge & Center Wrap Text

Font: Calibri, Size: 10, Bold, Italic, Underline, Paragraph, Styles, Editing

Formulas: AutoSum, Fill, Clear, Sort & Filter, Find & Select

Cells: Insert, Delete, Format

Styles: Normal, Neutral, Bad, Calculation, Check Cell

Conditional Formatting, Table

Number, Percentage, Increase/Decrease

Formulas: E60, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K

Nilai realisasi pendapatan tahun 2020 per 30 Juni 2020 pada ringkasan LRA sebesar Rp146.121.506

CHECK LIST VERIFIKASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA BPK-RI PERIODE 31 DESEMBER 2017

No	Uraian	Hasil Verifikasi		Keterangan
		Ya	Tidak	
Verifikasi atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)				
Kesesuaian saldo awal 2020 dengan saldo 2020 Audited				
1	Apakah nilai estimasi pendapatan tahun 2020 pada LRA Per 30 Juni 2020 sesuai dengan estimasi pendapatan 2020 audited dan disajikan dalam jumlah netto?	✓		Nilai estimasi pendapatan tahun 2020 per 30 Juni 2020 pada Face LRA sebesar Rp0
14	CaLK LRA Pendapatan	✓		Nilai estimasi pendapatan tahun 2020 per 30 Juni 2020 pada CaLK LRA Pendapatan sebesar Rp0
15	Apakah nilai pagu DIPA Tahun 2020 pada LRA Per 30 Juni 2020 sesuai dengan pagu DIPA Tahun 2020 audited dan disajikan dalam jumlah			Activate Windows Go to Settings to activate Windows

READY

VERIFIKASI LRA EDIT

Type here to search

COUNT: 10

16:07 18/11/2020

Lampiran 10: *Face* LRA

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2020 DAN
30 JUNI 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEMESTER I TA 2020		% thd Angg	SEMESTER I TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1	-	246.121.500	24,73	579.121.500
JUMLAH PENDAPATAN		-	246.121.500	24,73	579.121.500
BELANJA	B.2.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.2.1	12.487.700.000	5.660.990.547	44,93	12.487.700.000
Belanja Barang	B.2.2.2	27.129.110.000	9.899.280.762	36,51	27.129.110.000
Jumlah Belanja Operasi		39.616.810.000	15.560.271.309	39,31	39.616.810.000
Belanja Modal	B.2.2.3				
Belanja Tanah	B.2.2.3.1	-	-	0,00	-
Belanja Peralatan dan Mesin	B.2.2.3.2	12.487.700.000	-	0,00	12.487.700.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.2.2.3.3	27.129.110.000	-	0,00	27.129.110.000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.2.2.3.4	-	-	0,00	-
Belanja Modal lainnya	B.2.2.3.5	-	-	0,00	-
Jumlah Belanja Operasi		39.616.810.000	15.560.271.309	39,31	39.616.810.000
JUMLAH BELANJA		39.616.810.000	15.560.271.309	39,31	39.616.810.000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini – Halaman 5

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 11: CaLK LRA

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum LRA Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Semester I TA 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	-	0	-
	a. Penerimaan Pajak	-	-	-
	b. PNSP	-	-	-
	c. Hibah	-	-	-
2	Realisasi Belanja Negara	0	0	0
	- Belanja Rupiah Murni	0	0	0
	- Belanja Pinjaman LN	-	-	-
	- Belanja Rupiah Pendamping	-	-	-
	- Belanja Hibah LN	-	-	-
	- Belanja Barang Non Kas	-	-	-

Selama periode Semester I TA 2020 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari penetapan awal, pagu awal sebesar [REDACTED] setelah revisi terakhir menjadi sebesar [REDACTED]. Hal ini disebabkan adanya program penghematan belanja pemerintah karena adanya Pandemi COVID-19 dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja Semester I TA 2020 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 8

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
1	Pendapatan Negara dan Hibah	-	-
	a. Pendapatan Jasa	-	-
	b. Pendapatan Lain-lain	-	-
2	Belanja Negara	0	0
	- Belanja Pegawai	0	0
	- Belanja Barang	0	0
	- Belanja Modal	0	0

(Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 1)

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 11. 1: CaLK LRA Belanja Barang

B.2.2.2. Belanja Barang

Belanja Barang Pagu anggaran untuk Belanja Barang adalah [redacted] dan realisasi Belanja Barang Semester I TA 2020 sebesar [redacted] atau [redacted] dari alokasi Belanja Pegawai yang dianggarkan. Realisasi belanja barang Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019 adalah masing-masing sebesar [redacted] dan [redacted].

Realisasi belanja sampai dengan Semester I TA 2020 mengalami penurunan sebesar 31,28% dari Semester I TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh berkurangnya kegiatan selama masa Pandemic COVID-19.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Barang Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 15
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Barang
untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Semester I TA 2020	Semester I TA 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	[redacted]	[redacted]	[redacted]	(31,78)
5212	Belanja Barang Non Operasional	[redacted]	[redacted]	[redacted]	(31,78)
5218	Belanja Barang Persediaan	[redacted]	[redacted]	[redacted]	(31,78)
5221	Belanja Jasa	[redacted]	[redacted]	[redacted]	(31,78)
5231	Belanja Pemeliharaan	[redacted]	[redacted]	[redacted]	(31,78)
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	[redacted]	[redacted]	[redacted]	(31,78)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-	0,00
Jumlah Belanja Bruto		[redacted]	[redacted]	[redacted]	(31,78)
Pengembalian Belanja		-	[redacted]	[redacted]	(31,78)
Jumlah Netto		[redacted]	[redacted]	[redacted]	(31,78)

Pada semester I tahun 2020 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum mengalokasikan secara khusus belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19.

Realisasi Belanja Barang (52) Semester I TA 2020 yang dikapitalisasi ke aset tetap adalah sebesar Rp [redacted] dengan rincian sebagai berikut:

1	Kapitalisasi pada Peralatan dan Mesin	Rp	[redacted]
2	Kapitalisasi pada Software	Rp	-
3	Kapitalisasi pada ATB Lainnya	Rp	-
JUMLAH		Rp	[redacted]

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 11. 2: CaLK Belanja Modal

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020

(Rincian Belanja Barang yang dikapitalisasi ke Aset Tetap dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 32)

B.2.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal Pagu anggaran untuk Belanja Modal adalah Rp999.272.000,00 dan realisasi Belanja Modal Semester I TA 2020 sebesar Rp0,00 atau 0% dari alokasi Belanja Modal yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp999.272.000,00. Realisasi belanja Semester I TA 2020 mengalami penurunan sebesar 100% dari Semester I TA 2019.

Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Pengadaan kendaraan roda dua masih menunggu penghapusan/risalah lelang untuk menghilangkan bintang/ blokir, dan
- Kedadaan pandemi Covid-19 yang mengganggu proses pelaksanaan belanja,

yang menyebabkan belanja modal dilaksanakan pada semester II tahun 2020.

Rincian perbandingan realisasi Belanja Modal Semester I TA 2020 dan Semester I TA 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Uraian	Semester I TA 2020	Semester I TA 2019	Kenaikan (Penurunan)	
				(Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	0%
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	454.750.000	454.750.000	100%
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	344.500.000	344.500.000	100%
5361	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0%
	Realisasi Belanja Bruto	-	800.000.000	800.000.000	100%
	Pengembalian Belanja	-	-	-	-
	Jumlah Netto	-	800.000.000	800.000.000	100%

Pada semester I tahun 2020 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum mengalokasikan secara khusus belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-19.

Realisasi Belanja Modal Tanah pada Semester I TA 2020 sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Semester I TA 2020 sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Semester I TA 2020 sebesar Rp0,00.

CaLK LRA – Halaman 40

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 11. 3: CaLK Aset Tetap

C.2.2. ASET TETAP

Aset Tetap
Rp224.973,55
juta

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar [REDACTED] dan [REDACTED]. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut ini:

CaLK Neraca – Halaman 47

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020

Tabel 25
Rincian Perbandingan Aset Tetap
Per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Tanah	[REDACTED]	[REDACTED]
2	Peralatan dan Mesin	[REDACTED]	[REDACTED]
3	Gedung dan Bangunan	[REDACTED]	[REDACTED]
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	[REDACTED]	[REDACTED]
5	Aset Tetap Lainnya	[REDACTED]	[REDACTED]
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	Jumlah	[REDACTED]	[REDACTED]
7	Akumulasi Penyusutan	[REDACTED]	[REDACTED]
	Nilai Buku Aset Tetap	[REDACTED]	[REDACTED]

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2020 pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 26
Rincian Perbandingan Aset Tetap pada Aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN
Per 30 Juni 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SAIBA	SIMAK-BMN	Selish
1	Tanah	[REDACTED]	[REDACTED]	-
2	Peralatan dan Mesin	[REDACTED]	[REDACTED]	-
3	Gedung dan Bangunan	[REDACTED]	[REDACTED]	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	[REDACTED]	[REDACTED]	-
5	Aset Tetap Lainnya	[REDACTED]	[REDACTED]	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
	Jumlah	[REDACTED]	[REDACTED]	-
7	Akumulasi Penyusutan	[REDACTED]	[REDACTED]	-
	Nilai Buku Aset Tetap	[REDACTED]	[REDACTED]	-

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar [redacted] dan [redacted]. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat berupa Software, Lisensi, dan Aset Tak Berwujud Lainnya yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 37

Rincian Aset Tak Berwujud
Per 30 Juni 2020

No.	Keterangan	Nilai
1.	Software	[redacted]
2.	Lisensi	[redacted]
3.	Aset Tak Berwujud lainnya	-
	Total	[redacted]

(Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan-Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 16)

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Untuk periode yang berakhir dengan 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019
(Dalam Rupiah)

	Semester I TA 2020		Semester I TA 2019	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN & HIBAH	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00
Belanja Transaksi Kas	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Belanja Rupiah Murni	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
Belanja Pinjaman dan Hibah	-	-	-	-
Belanja Transaksi Non Kas	-	-	-	-
Belanja Barang Non Kas	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 14: Neraca Percobaan Akruai

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NPSAIB
Tanggal : 16/07/20
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROPINSI : 0200 JAWA BARAT
SATUAN KERJA : 450799 BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	100.000.000	
0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	100.000.000	
0	115212	Plutang Lainnya	100.000.000	
0	116212	Penyisihan Plutang Tidak Tertagih - Plutang Lainnya		100.000.000
0	117111	Barang Konsumsi	50.000.000	
0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	50.000.000	
0	117199	Persediaan Lainnya	50.000.000	
0	131111	Tanah	100.000.000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	100.000.000	
0	133111	Gedung dan Bangunan	100.000.000	
0	134112	Irigasi	100.000.000	
0	134113	Jaringan	100.000.000	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	100.000.000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		100.000.000
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		100.000.000
0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi		100.000.000
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		100.000.000
0	162151	Software	100.000.000	
0	162161	Lisensi	50.000.000	
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	50.000.000	
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan		50.000.000
0	169315	Akumulasi Amortisasi Software		100.000.000
0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi		50.000.000
0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		100.000.000
0	219123	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya		100.000.000
0	219511	Uang Muka dari KPPN		100.000.000
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		100.000.000
0	313121	Diterima dari Entitas Lain	100.000.000	
0	391111	Ekuitas		100.000.000
0	391119	Koreksi Lainnya		100.000.000
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		50.000.000
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		100.000.000
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	100.000.000	
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	100.000.000	

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamakan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 15: Kertas Kerja Analisa Belanja Modal dan Mutasi

KERTAS KERJA ANALISA BELANJA MODAL DAN MUTASI (PEMBELIAN + PENGEMBANGAN)
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
PER 30 JUNI 2020

Akun	5311	5321	5331	5361	5231	5218	Total
Intrakomptabel							
Tanah	0	0	0	0	0	0	0
PM	0	0	0	0	0	0	0
GB	0	0	0	0	0	0	0
Jalan	0	0	0	0	0	0	0
Irigasi	0	0	0	0	0	0	0
Jaringan	0	0	0	0	0	0	0
ATL	0	0	0	0	0	0	0
ATR	0	0	0	0	0	0	0
Software	0	0	0	0	0	0	0
Lisensi	0	0	0	0	0	0	0
ATB Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Total Intrakomptabel	0						
Ektrakomptabel							
PM	0	0	0	0	0	0	0
GB	0	0	0	0	0	0	0
ATL	0	0	0	0	0	0	0
Total Ekstrakomptabel	0						
Pemeliharaan GB	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan	0	0	0	0	0	0	0
Persediaan	0	0	0	0	0	0	0
Total	0						
Belanja Modal	0						
Selisih	0						

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamakan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 16: ADK SAIBA (LK BPK RI Perwakilan NTB TW III 2020)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 30 NOVEMBER 2020 DAN 30 NOVEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 890614 SATKER INI BELUM DIREKAM
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

Kode Lajp. : LRAST
Tanggal : 15 Oktober 2020
Halaman : 1
Prog.id : lu_passtt

No	URAIAN	2020			2019			REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
		3	4	5	6	7	8		
1	2								10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.1.1	PENERIMAAN NEGARA								
A.1.1.a	Penerimaan Perpajakan								
A.1.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak								
A.1.2	HIBAH								
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH								
B	BELANJA NEGARA								
B.1.1	Rupiah Murni								
B.1.1.a	Belanja Pegawai								
B.1.1.b	Belanja Barang								
B.1.1.c	Belanja Modal								
B.1.1.d	Pembayaran Bunga Utang								
B.1.1.e	Subsidi								
B.1.1.f	Hibah								
B.1.1.g	Bantuan Sosial								
B.1.1.h	Belanja Lain-lain								
B.1.2	Pinjaman dan Hibah								
B.1.2.a	Belanja Pegawai								
B.1.2.b	Belanja Barang								
B.1.2.c	Belanja Modal								
B.1.2.d	Pembayaran Bunga Utang								
B.1.2.e	Subsidi								
B.1.2.f	Hibah								
B.1.2.g	Bantuan Sosial								
B.1.2.h	Belanja Lain-lain								
	JUMLAH BELANJA								
C	PEMBIAYAAN								
C.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)								
C.1.1	Pencetakan Dalam Negeri								
C.1.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)								
C.1.2	Non Perbankan Luar Negeri (Neto)								

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja untuk periode yang berakhir
sampai dengan 30 September 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah			
	a. Penerimaan Pajak			
	b. PNB			
	c. Hibah			
2	Realisasi Belanja Negara			
	- Belanja Rupiah Murni			
	- Belanja Pinjaman LN			
	- Belanja Rupiah Pendaamping			
	- Belanja Hibah LN			
	- Belanja Barang Non Kas			

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 18: Tabel 18 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30 September 2019 (LK BPK RI Perwakilan NTB TW III 2020)

Tabel 18
Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30
September 2019
(dalam Rupiah)

Uraian	Triwulan III TA 2020	Triwulan III TA 2019	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
Komputer Unit	0,000	0,000	0,000	0,000
Peralatan	0,000	0,000	0,000	0,000
KDP	0,000	0,000	0,000	0,000
Realisasi Belanja Bruto	0,000	0,000	0,000	0,000
Pengembalian Belanja	0	0	0	-
Jumlah Netto	0,000	0,000	0,000	0,000

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 19: *Form Analisis Neraca*

Form Analisis Neraca, 2020 - Microsoft Excel

Microsoft account

AutoSum, Fill, Sort & Find & Filter, Select, Editing

Insert, Delete, Format, Cells

Styles: Currency (0) 2, Normal 2, Normal, Good, Bad

Conditional Formatting, Table, Number, Alignment, Font, Clipboard, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View

Calibri, 10, Bold, Italic, Underline, Merge & Center, Wrap text

B34: Cek pada neraca dan neraca percobaan akrual bahwa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran ([111611]) telah sama dengan saldo Uang Muka dari KPPN (219511)?

No	Uraian	Hasil Verifikasi		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Verifikasi atas Neraca pada akun Kas di Bendahara Pengeluaran			
a.	Cek apakah saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran di neraca per 30 Juni 2020 yang disajikan pada Face Neraca dan CaLK per 30 Juni 2020 telah sama dengan saldo audited 2020?	<input checked="" type="checkbox"/>		Saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 adalah
b.	Cek bahwa saldo Kas di BP berada di Debet dan tidak ada akun "Null"	<input checked="" type="checkbox"/>		
c.	Cek adakah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020? Jika ada cek kesesuaian angka antara:			
	- ADK SAIBA			Saldo akun Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 adalah
	- Neraca Face (tabel manual majmun tetapan) (Kas SALBA)			

Page 1

Verifikasi Kas di BP, Verifikasi Kas lainnya, Rutang, Penyisihan Rutang, Verifikasi Batasnya Diberi, Verifikasi Parse

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 20: CaLK Neraca

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019 Audited

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Perbandingan Neraca per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Komposisi Perbandingan Neraca
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	%
Aset	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100%
Kewajiban	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100%
Ekuitas	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100%

Jumlah Aset per 31 Desember 2019 sebesar 1.000.000.000,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar 1.000.000.000,00, Aset Tetap sebesar 0,00, serta Aset Lainnya sebesar 0,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar 1.000.000.000,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar 1.000.000.000,00.
(Neraca dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 6)

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. ASET LANCAR

Aset Lancar Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar 1.000.000.000,00 dan 1.000.000.000,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 20
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
3	Belanja Dibayar di Muka (Prepaid)	-	-
4	Piutang Bukan Pajak	1.000.000,00	1.000.000,00
5	Penyalihan Piutang Tidak Tertagih -	0,00	0,00
6	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-
7	Penyalihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-
8	Perediaan	1.000.000,00	1.000.000,00
	Total	1.000.000,00	1.000.000,00

CaLK Neraca – Halaman 43

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 21: *Face Neraca*

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2020

NERACA			
SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT			
NERACA			
PER 30 JUNI 2020 DAN 31 DESEMBER 2019			
(Dalam Rupiah)			
URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2020	31 DESEMBER 2019
ASET			
ASET LANCAR	C.2.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	200.000.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2	200.000.000	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.4	200.000.000	70.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2.1.5	200.000.000	100.000.000
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.2.1.6	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.2.1.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.2.1.7	-	-
Persediaan	C.2.1.8	200.000.000	200.000.000
Jumlah Aset Lancar		200.000.000	270.000.000
ASET TETAP	C.2.2		
Tanah	C.2.2.1	200.000.000.000	200.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	200.000.000.000	200.000.000.000
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	200.000.000.000	200.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.2.4	200.000.000.000	200.000.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	200.000.000.000	200.000.000.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.7	200.000.000.000	200.000.000.000
Jumlah Aset Tetap		200.000.000.000	200.000.000.000
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.2.3		
Tagihan TP/TGR	C.2.3.1	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.2.3.2	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET LAINNYA	C.2.4		
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1	200.000.000	200.000.000
Aset Lain-lain	C.2.4.2	200.000.000	200.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.2.4.3	200.000.000	200.000.000
Jumlah Aset Lainnya		200.000.000	200.000.000
JUMLAH ASET			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1	200.000.000	200.000.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2	200.000.000	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.5.3	-	200.000.000
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4	200.000.000	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		200.000.000	200.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN			
EKUITAS	C.2.6		
Ekuitas	C.2.6	200.000.000.000	200.000.000.000
JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini – Halaman 6

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 22: Saldo UP di LPJ Bendahara Pengeluaran Semesteran

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN		Tahun Anggaran
	Bulan : Juni 2020		2020
Kementerian/Lembaga	(004)	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	
Unit Organisasi	(01)	Badan Pemeriksa Keuangan	
Provinsi/Kab/Kota	(51)	KOTA BANDUNG	
Saluran Kerja	(450799)	BP PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	
Alamat dan Telp	Jalan Mochammad Toha Nomor 164		
No Krns & Kewenangan	(0001 KD)	Kantor Daerah	
Dakumant	(01)	DIPA	
Nomor Dokumen	DIPA-004.01.2.450799/2020		
Tanggal Dokumen	12-11-2019		
Tahun Anggaran	2020		
KPPN	(022)	BANDUNG	

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 387.793.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 001094

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
A.	BP Kas, BPP, dan UM Perjadiin				
1	BP Kas (tunai dan bank)				
2	BP Uang Muka/Voucher				
3	BP BPP (Kas pada BPP)	0	0	0	0
B.	BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadiin				
1	BP UP *)				
2	BP LS-Bendahara				
3	BP Pajak	0			
4	BP Lain-lain				

*Jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp. 0

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1	Uang Tunai di brankas	Rp.	
2	Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)	Rp.	
3	Jumlah kas	Rp.	

III. Selisih Kas

1	Saldo Akhir BP Kas (I A 1 kolom (6))	Rp.	
2	Jumlah Kas (II 3)	Rp.	
3	Selisih Kas	Rp.	

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1	Saldo UP	Rp.	
2	Kuitansi UP	Rp.	
3	Jumlah UP	Rp.	
4	Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	
5	Selisih Pembukuan UP	Rp.	0

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):

1. Terdapat kesulitan uang pecahan kecil
2. -- Tidak Ada --

W.P. 1962.1230.1963.03.1000

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 22. 1: Saldo UP di LPJ Bendahara Pengeluaran Tahunan

Form LPJ Pengeluaran	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN		Tahun Anggaran 2019
	Bulan : Desember 2019		
Kementerian/Lembaga :	(004)	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	①
Unit Organisasi :	(01)	Badan Pemerksa Keuangan	
Provinsi/Kab/Kota :	(51)	KOTA BANDUNG	
Satuan Kerja :	(450799)	BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT	
Alamat dan Telp. :	Jl. Moch Toha No. 164		
No Kruw & Kewenangan :	(0001.KD)	Kantor Daerah	
Dokumen :	(01)	DIPA	
Nomor Dokumen :	DIPA-004.01.2.450799/2019		
Tanggal Dokumen :	05-12-2018		
Tahun Anggaran :	2019		
KPPN :	(022)	BANDUNG I	

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor:005289

No.	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BP Kas, BPP, dan UM Perjadin					
1.	BP Kas (tunai dan bank)				
2.	BP Uang Muka/Voucher				
3.	BP BPP (Kas pada BPP)				
B. BP selain Kas, BPP, dan UM Perjadin					
1.	BP UP *)				
2.	BP LS-Bendahara				
3.	BP Pajak				
4.	BP Lain-lain				

*Jumlah pengurangan pada BP UP sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-GU-kan sebesar Rp. 0

II. Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1. Uang Tunai di brankas
2. Uang di rekening bank (terlampir Daftar Rincian Kas di Rekening)
3. Jumlah kas

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))
2. Jumlah Kas (II.3)
3. Selisih Kas

IV. Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Saldo UP
2. Kuitansi UP
3. Jumlah UP
4. Saldo UP menurut UAKPA
5. Selisih Pembukuan UP

V. Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada):

1. -- Tidak Ada --
2. -- Tidak Ada --

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 24: Laporan Barang Persediaan dari BMN

UAPB : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 UAPPB-EI : SEKRETARIAT JENDERAL
 UAPPB-W : BPK RI PERWAKILAN PROV JAWA BARAT

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 TAHUN ANGGARAN :2019

UAKPB : BPK RI PERWAKILAN PROV JAWA BARAT
 KODE UAKPB : 

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	112.809.038
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	371.200
117114	Suku Cadang	0
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	0
117199	Persediaan Lainnya	37.704.000
	Jumlah	150.884.238

Bandung, 27 April 2020
 Petugas Pengelola Persediaan,
 Staf Subbagian Umum dan TI



*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 25: Laporan Posisi BMN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Tgl Cetak : 27-04-2020
Halaman : 1

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
KODE UAKPB :

Kode	Uraian	
117111	BARANG KONSUMSI	
1.01.01.01.001	Alat Tulis	1.01.01.01.001
1.01.01.01.002	Penjepit Kertas	1.01.01.01.002
1.01.01.01.004	Penghapus/Korektor	1.01.01.01.004
1.01.01.01.005	Buku Tulis	1.01.01.01.005
1.01.01.01.006	Ordner Dan Map	1.01.01.01.006
1.01.01.01.007	Penggaris	1.01.01.01.007
1.01.01.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	1.01.01.01.008
1.01.01.01.009	Pita Mesin Ketik	1.01.01.01.009
1.01.01.01.010	Alat Perekat	1.01.01.01.010
1.01.01.01.011	Stadler HD	1.01.01.01.011
1.01.01.01.012	Alat Tulis Kantor Lainnya	1.01.01.01.012
1.01.01.02.001	Kertas HVS	1.01.01.02.001
1.01.01.02.004	Amplop	1.01.01.02.004
1.01.01.02.009	Kertas Dan Cover Lainnya	1.01.01.02.009
1.01.01.02.010	Bahan Cetak Lainnya	1.01.01.02.010
1.01.01.03.001	Continuous Form	1.01.01.03.001
1.01.01.03.002	Pita Printer	1.01.01.03.002
1.01.01.03.003	Tinta/Toner Printer	1.01.01.03.003
1.01.01.03.004	Disket	1.01.01.03.004
1.01.01.03.005	USB/Flash Disk	1.01.01.03.005
1.01.01.03.007	kartu Memori	1.01.01.03.007
1.01.01.03.008	Harddisk Internal	1.01.01.03.008
1.01.01.03.009	Mouse	1.01.01.03.009
1.01.01.03.010	Bahan Komputer Lainnya	1.01.01.03.010
1.01.01.03.011	Kabel Listrik	1.01.01.03.011
1.01.01.03.012	Lampu Listrik	1.01.01.03.012
1.01.01.03.013	Stop Kontak	1.01.01.03.013
1.01.01.03.014	Saklar	1.01.01.03.014
1.01.01.03.015	Stacker	1.01.01.03.015
1.01.01.03.016	Starter	1.01.01.03.016
1.01.01.03.018	Batu Baterai	1.01.01.03.018
1.01.01.03.019	Alat Listrik Lainnya	1.01.01.03.019
1.01.01.03.020	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.01.01.03.020
JUMLAH BARANG KONSUMSI		117111
117113	BAHAN UNTUK PEMELIHARAAN	
1.01.01.04.001	Alat-Alat Pel Dan Lap	1.01.01.04.001
1.01.01.04.002	Kunci, Kran Dan Semprotan	1.01.01.04.002
1.01.01.04.003	Alat Untuk Makan Dan Minum	1.01.01.04.003
1.01.01.04.004	Pengharum Ruangan	1.01.01.04.004

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 26: Berita Acara Stock Opname

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN
NOMOR: 02/BA.CEKFISIK/PERSEDIAAN/12/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun 2019 (31-12-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : [Redacted]
NIP : [Redacted]
Unit Kerja : Subbagian Umum dan TI

II. Nama : [Redacted]
NIP : [Redacted]
Unit Kerja : Subbagian Umum dan TI

Telah melakukan pemeriksaan fisik barang persediaan di lingkungan satuan kerja Sekretariat Jenderal/BPK RI Pusat c.q. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat [Redacted] sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (hasil pemeriksaan fisik terlampir)

Hasil pemeriksaan fisik akan digunakan sebagai dasar /bahan untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat satuan kerja Sekretariat Jenderal/BPK RI Pusat dan tingkat Eselon I serta Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Demikian berita acara ini dibuat, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petugas Pemeriksa Fisik, Mengetahui,
Kepala Subbagian Umum dan TI

[Redacted Signature] [Redacted Signature]

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA BARANG TAHUNAN
PERIODE TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

➤ Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat; dan
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

➤ Entitas Pelaporan adalah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

➤ Periode Laporan Tahun Anggaran 2019.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

➤ Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.06/2013 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamakan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 28: Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 27-04-2020
Halaman : 1
Kode Lab. : LBS/ESKT

NAMA UAK/PB : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

1	2	3	SALDO PER 1 JANUARI 2019		BERTAMBAH		METASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			4	5	6	7	8	9	10	11		
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
121111	TANAH		11.911								11.911	
2.01.01.01.001	Truah, Bargunan Bantah, Negeri Gallegar I	M2	3.535								3.535	
2.01.01.01.005	Truah, Bargunan Mese/Wisnu/Awarum	M2	1.236								1.236	
2.01.01.04.008	Tanda, Bargunan Kasari, Penatitizah	M2	7.140								7.140	
121111	PERALATAN DAN MESIN		3.595								3.595	
3.01.03.02.001	Elevator/Lift	Unit	2								2	
3.01.03.04.003	Stationary Generating Set	Unit	1								1	
3.01.03.05.999	Potrys Lainnya	Unit	10								10	
3.02.01.01.001	Sedan	Unit	1								1	
3.02.01.02.003	Mobil Bina (Pemmpang 16 Orang Kibawah)	Unit	7								7	
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	6								6	
3.02.02.01.009	Bargaye Trady	Unit	9								9	
3.02.02.01.019	Mega Doong Saji/Trolley Saji	Unit	4								4	
3.02.02.02.001	Sepeda	Unit	5								5	
3.03.01.01.013	Mesin Kerpazole	Buah	2								2	
3.03.02.04.002	Dongkrak Hidrolik	Buah	0								0	
3.03.02.05.001	Tool Kit Set	Buah	13								13	
3.03.02.05.014	Crimping Tools	Buah	1								1	
3.03.02.05.027	Scaffolding Set & Tool	Buah	4								4	
3.03.02.11.003	Carmin Bese	Buah	1								1	
3.03.02.29.999	Alat Bengkel Tak Termasuk Lainnya	Buah	1								1	
3.03.03.01.032	Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	Buah	16								16	
3.03.03.05.999	Alat Ukur Lainnya	Buah	3								3	
3.04.01.05.004	Alat Pengukur Temperatur	Buah	1								1	

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 29: Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel

Tanggal : 27-04-2020
Halaman : 12
Kode Lpb : LPSISSHT

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 004.01.02.450799 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2019						NILAI BUKU
			KUANTITAS	NILAI	AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	BEBAN PENYUSUTAN PERIODE INI	AK. PENYUSUTAN PERIODE INI	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	
3			3						10
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Perawat Komputer)	Buah	3						
3.10.02.04.001	Server	Buah	3						
3.10.02.04.071	Kabel UTP	Buah	1						
3.10.02.04.004	Switch	Buah	20						
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya		6						
TOTAL									

Bandung, 27 April 2020
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala Perwakilan



*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 30: Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Tanggal : 27-04-2020
 Halaman : 1
 Kode Lap. : LFTSSKT

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 SEKRETARIAT JENDERAL
 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNATAHUNAN
 ASET TAK BERWUJUD
 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
 TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA UAKPB : 004.01.02.430799 BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019							
KODE	URAIAN	SAT	KUANTITAS	NILAI	AK. AMORTISASI S.D PERIODE INI	BEBAN AMORTISASI PERIODE INI	AK. AMORTISASI PERIODE INI	TOT. AK. AMORTISASI S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	SOFTWARE		7						
8.01.01.001	Software Komputer		7						
162161	LESENSI		23						
8.01.01.002	Lisensi		23						
TOTAL									

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 31: Kartu Piutang/Lampiran Daftar Rekapitulasi PNBP

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG BUKAN PAJAK
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
PER 31 DESEMBER 2019

No	Uraian Piutang	Jumlah Piutang per 31 Desember 2018 (Rp)	Penambahan (Penyesuaian 31 Desember 2019) (Rp)	Pengurangan				Jumlah Piutang per 31 Desember 2019 (Rp)	Keterangan
				No Dokumen	Tanggal Dokumen	Jumlah Penyetoran	Pengurangan Atas Saldo 31 Desember 2018		
1	Piutang Belanja Tunj. Fungsional an. <i>[Nama]</i>	1.000.000						1.000.000	
2	<i>[Nama]</i>	1.000.000			24-Jan-19	1.000.000	1.000.000	-	
3	<i>[Nama]</i>	1.000			24-Jan-19	1.000	1.000	-	
4	<i>[Nama]</i>	100.000			30-Jan-19	100.000	100.000	-	
5	<i>[Nama]</i>	1.000.000			24-Jan-19	1.000.000	1.000.000	-	
6	<i>[Nama]</i>	100.000			29-Jan-19	100.000	100.000	-	
7	<i>[Nama]</i>	1.000.000			24-Jan-19	1.000.000	1.000.000	-	
8	<i>[Nama]</i>	1.000.000			24-Jan-19	1.000.000	1.000.000	-	
9	<i>[Nama]</i>	100.000			24-Jan-19	100.000	100.000	-	
10	<i>[Nama]</i>	1.000.000			24-Jan-19	1.000.000	1.000.000	-	
11	<i>[Nama]</i>	1.000.000			24-Jan-19	1.000.000	1.000.000	-	
12	<i>[Nama]</i>	100.000			24-Jan-19	100.000	100.000	-	
13	<i>[Nama]</i>	100.000			24-Jan-19	100.000	100.000	-	
14	<i>[Nama]</i>	100.000			24-Jan-19	100.000	100.000	-	
15	<i>[Nama]</i>	100.000			24-Jan-19	100.000	100.000	-	
16	<i>[Nama]</i>	1.000.000			24-Jan-19	1.000.000	1.000.000	-	

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 32: Lampiran Kartu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

KARTU PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT SELOM I SETJEN
PER 31 DESEMBER 2019

No	Name Debitur	No dan Tanggal Spn	Saldo Piutang (Rp)	Agunan/Borang Sitaan			Kualitas Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			Keterangan
				Bentuk Agunan/Sitaan	Nilai Agunan/Sitaan (Rp)	Nilai Agunan/Sitaan yang dipertitungkan (Rp)		Saldo Piutang setelah Agunan/Sitaan (Rp)	Persentase Penyisihan	Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 4-7)	(10)	(11 = 9 X 10)	(12)
1			2.000.000				Lancar	2.000.000	100%	2.000.000	
2			2.000.000				Lancar	2.000.000	100%	2.000.000	
3			2.000.000				Lancar	2.000.000	100%	2.000.000	
4			2.000.000				Lancar	2.000.000	100%	2.000.000	
5			2.000.000				Lancar	2.000.000	100%	2.000.000	
6			2.000.000				Lancar	2.000.000	100%	2.000.000	
7			2.000.000				Lancar	2.000.000	100%	2.000.000	
8			2.000.000				Lancar	2.000.000	100%	2.000.000	
9			2.000.000				Lancar	2.000.000	100%	2.000.000	
10			2.000.000				Lancar	2.000.000	100%	2.000.000	

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 33: Kertas Kerja Saldo Belanja Dibayar di muka

KERTAS KERJA PERHITUNGAN BELANJA BARANG DIBAYAR DI MUKA
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
PER 31 DESEMBER 2019

No	No. SPM/SP2D/SPK	Lokasi Gedung/Rumah	Nilai Kontrak (Rp)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Nilai sewa/hari (Rp)	Nilai Sewa Tahun Sebelumnya (2014/2015/2016/2017/2018)	Nilai Sewa Semester I 2019 (Rp)	Nilai Sewa Semester II 2019 (Rp)	Total Nilai Sewa Tahun 2019 (Rp)	Sisa Nilai Sewa Tahun 2019 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0

Nihil

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 34: Kertas Kerja Pembelian Persediaan

KERTAS KERJA PEMBELIAN PERSEDIAAN BDK PEKERJAAN PROVINSI JAWA BARAT PER 31 DESEMBER 2019										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(dalam Rupiah)
No	No Faktur/Kuitansi	tanggal Faktur	No BAST	tanggal BAST	MAK	Nilai Faktur	Nilai Input	Selisih	No-SP2D	Keterangan Selisih
										(1.1)
1	01/umum/02/2019	23 Januari 2019		23 Januari 2019	523123					
2	02/umum/02/2019	23 Januari 2019		23 Januari 2019	523112					
3	03/umum/02/2019	30 Januari 2019		25 Januari 2019	523112					
4	04/ps/02/2019	29 Januari 2019		29 Januari 2019	521811					
5	05/ps/02/2019	29 Januari 2019		29 Januari 2019	521811					
6	06/ps/02/2019	29 Januari 2019		29 Januari 2019	521811					
7	07/ps/02/2019	29 Januari 2019		29 Januari 2019	521811					
8	08/sdm/02/2019	07 Februari 2019		07 Januari 2019	521811					
9	09/sdm/02/2019	02 Februari 2019		08 Januari 2019	521811					
10	10/umum/02/2019	31 Januari 2019		12 Januari 2019	521811					
11	11/umum/02/2019	30 Januari 2019		15 Januari 2019	523112					
12	12/umum/02/2019	23 Januari 2019		22 Januari 2019	523112					
13	13/umum/02/2019	31 Januari 2019		22 Januari 2019	523112					
14	14/keu/03/2019	21 Februari 2019		05 Februari 2019	521811					
15	15/keu/03/2019	06 Februari 2019		21 Februari 2019	521811					
16	16/keu/03/2019	11 Februari 2019		05 Februari 2019	521811					
17	17/umum/03/2019	14 Februari 2019		08 Februari 2019	521811					
18	18/umum/03/2019	18 Februari 2019		18 Februari 2019	521811					
19	19/hukum/03/2019	20 Februari 2019		20 Februari 2019	521811					
20	21/humas/03/2019	21 Februari 2019		21 Februari 2019	521811					
21	27/humas/03/2019	21 Februari 2019		21 Februari 2019	521811					
22	23/humas/03/2019	21 Februari 2019		21 Februari 2019	521811					
23	24/umum/03/2019	13 Maret 2019		13 Maret 2019	521811					
24	25/keu/03/2019	04 Maret 2019		04 Maret 2019	521811					
25	26/umum/03/2019	13 Maret 2019		13 Maret 2019	521811					
26	28/hukum/03/2019	18 Maret 2019		18 Maret 2019	521811					
27	29/hukum/03/2019	18 Maret 2019		18 Maret 2019	521811					
28	30/umum/03/2019	13 Maret 2019		13 Maret 2019	521811					
29	31/umum/03/2019	13 Maret 2019		13 Maret 2019	523112					
30	32/umum/03/2019	18 Maret 2019		15 Maret 2019	521811					
31	33/umum/03/2019	19 Maret 2019		06 Maret 2019	521811					
32	34/umum/03/2019	20 Maret 2019		26 Maret 2019	521811					

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 35: Status Tanah

STATUS TANAH BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
PER 31 DESEMBER 2019

No	Nama Barang dan Peruntukkan	Lokasi/Alamat	Bukti Kepemilikan Tanah				
			Atas Nama	Nomor	Tanggal	Luas	Tahun Perolehan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I/Rumah Dinas Jabatan		Pemerintah Republik Indonesia CO. Badan Pemeriksa Keuangan RI	Pakai	28/12/2006		
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I/Rumah Dinas Jabatan		Pemerintah Republik Indonesia CO. Badan Pemeriksa Keuangan RI	Pakai	22/08/2011		
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I/Rumah Dinas Jabatan		Pemerintah Republik Indonesia CO. Badan Pemeriksa Keuangan RI	Pakai	27/03/2012		
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		Pemerintah Republik Indonesia CO. Badan Pemeriksa Keuangan RI	Pakai	30/05/2011		
5	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama		Pemerintah Republik Indonesia CO. Badan Pemeriksa Keuangan RI				

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 36: Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka

KERTAS KERJA PERHITUNGAN BELANJA BARANG DIBAYAR DI MUKA
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
PER 31 DESEMBER 2019

No	No. SPM/SP2D/SPK	Lokasi Gedung/Rumah	Nilai Kontrak (Rp)	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Nilai sewa/hari (Rp)	Nilai Sewa Tahun Sebelumnya (2014/2015/2016/2017/2018)	Nilai Sewa Semester I 2019	Nilai Sewa Semester II 2019	Total Nilai Sewa Tahun 2019	Sisa Nilai Sewa Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) + (10)	(12)
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31-12-2018	Beban Peny. Per 31-12-2019	Akm. Peny. Per 31-12-2019	Total Akm. Peny. Per 31-12-2019	Nilai Buku Per 31-12-2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Tanah							
1	Tanah							
B	Jumlah Peralatan dan Mesin							
1	Alat Bantu	7						
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7						
3	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2						
4	Alat Bengkel Bermesin	10						
5	Alat Bengkel Tak Bermesin	5						
6	Alat Ukur	5						
7	Alat Pengolahan	4						
8	Alat Kantor	5						
9	Alat Rumah Tangga	5						
10	Alat Studio	5						
11	Alat Komunikasi	5						
12	Peralatan Pemancaar	10						
13	Alat Kedokteran	5						
14	Alat Kesehatan Umum	5						
15	Unit Alat Laboratorium	8						
16	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	10						
17	Komputer Unit	4						
18	Peralatan Komputer	4						
19	Unit Peralatan Proses/Produksi	8						
20	Peralatan Olah Raga	3						
C	Jumlah Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50						

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Rincian Nilai Koreksi-Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan
Per 31 Desember 2019

No	Aset Tetap/Uraian Koreksi	Akumulasi Penyusutan
		Per 31-12-2019
A	Peralatan dan Mesin	
	Koreksi Saldo Awal	-
	Koreksi Nilai Pembelian	-
	Transfer Masuk	-
	Reklasifikasi Masuk	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	Penghapusan	-
	Transfer Keluar	-
	Reklasifikasi Keluar	-
	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	-
	Jumlah	-
B	Gedung dan Bangunan	
	Koreksi Pembelian	-
	Reklasifikasi Masuk	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	Transfer Keluar	-
	Reklasifikasi Keluar	-
	Jumlah	-
C	Jalan dan Jembatan	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
	Jumlah	-
D	Irigasi	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Transfer Keluar	-
	Jumlah	-
E	Jaringan	
	Pembelian	-
	Transfer Keluar	-
	Koreksi Pencatatan	-
	Jumlah	-
F	Aset Tetap Lainnya	
	Reklasifikasi Masuk	-
	Transfer Keluar	-
	Jumlah	-

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 39: Jurnal Penyesuaian

MEMO PENYESUAIAN
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
No. 38/MP.01/XVIII.BDG.1.3/10/2019

Berdasarkan hasil penelaahan, terdapat pembayaran SPM LS bendahara kepada pegawai yang bersangkutan sebesar _____

Atas pencatatan tersebut perlu dilakukan penyesuaian melalui Jurnal Penyesuaian Akun Kas Lainnya Setara Kas pada tanggal 1 Oktober 2019 sesuai dengan Lampiran I.A Nota Dinas Sekretariat Jenderal No. 29/ND/X/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Laporan Keuangan BPK per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

D 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya
K 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Bandung, 1 Oktober 2019
Kasubbag Keuangan



*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 40: Analisis Form LO

Form Analisa LO_III NTB 2020 - Microsoft Excel

KERTAS KERJA ANALISA LAPORAN OPERASIONAL SATUAN KERJA BPK-RI PERIODE 31 SEPTEMBER 2020									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9	No	Urutan	Hasil Verifikasi	Ya	Tidak	Selengkapnya	Akun	Nilai Setiuh	Keterangan
10						Yes			
11	1	Kecapaian saldo awal 2020 dengan saldo 2016 Audited				Yes			
12	2	Kecapaian saldo di Laporan Keuangan (SMBK dan hardcopy LK) dengan e-Rekon-LK							
13	a.	Apakah seluruh akun Neraca Perolehan Aktiva (Ihusus terkait akun di LO) pada laporan keuangan sama dengan aplikasi e-Rekon LK				Yes			Semua saldo sesuai antara Neraca Face dengan Neraca Perolehan Aktiva
14	b.	Apakah seluruh akun di face Laporan Operasional pada laporan keuangan sama dengan aplikasi e-Rekon LK				Yes			Semua saldo sesuai antara Neraca Face dengan Neraca Perolehan Aktiva
15									
16	3	Pengecekan saldo normal							
17	a.	Adakah akun dengan urutan "null" atau tidak ada urutannya				Yes			
18									
19									
20		Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali Beban Penyesuaian Pusing osasat bernilai							
21	b.	Kegiatan Operasional	Positif						
22	-	Pendapatan	Positif						
23	-	Beban Pegawai	Positif						
24	-	Beban Persediaan	Positif						
25	-	Beban Barang dan Jasa	Positif						
26	-	Beban Pemeliharaan	Positif						
27	-	Beban Perjalanan Dinas	Positif						
28	-	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Positif						
29	-	Beban Penyesuaian Pusing Tak Tertajih	Pos/Neg						

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 41: Neraca *Face LO*

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2020

LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERKAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020 DAN 30
SEPTEMBER 2019
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TRIMULAN II TAHUN 2020	TRIMULAN III TAHUN 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.2.1		
JUMLAH PENDAPATAN			
SEBAN	0.2.2		
Beban Pegawai	0.2.2.1		
Beban Pemeliharaan	0.2.2.2		
Beban Barang dan Jasa	0.2.2.3		
Beban Pemeliharaan	0.2.2.4		
Beban Perjalanan Dinas	0.2.2.5		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.2.2.6		
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.2.2.7		
JUMLAH SEBAN			
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL			
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.2.3		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonfinciar			
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
POS LUAR BIASA	0.2.4		
Pendapatan Luar Biasa			
Beban Luar Biasa			
SURPLUS/DEFISIT LO			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini – Halaman 7

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 42: CaLK LO

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2020



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Komposisi Perbandingan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 46
Komposisi Perbandingan Laporan Operasional
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30
September 2019
(dalam Rupiah)

Urutan	30 September 2020	30 September 2019	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional			
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional			
Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa			
Surplus/Defisit LO			

Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 sebesar *Rp1.000.000.000* terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar *Rp1.000.000.000* dan Beban Operasional sebesar *Rp1.000.000.000*.

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 sebesar *Rp1.000.000.000* terdiri dari Surplus Pelepasan Aset Non Lancar sebesar *Rp1.000.000.000*, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar *1.000.000.000* serta Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar *Rp1.000.000.000*.

Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 sebesar *1.000.000.000*.

(Laporan Operasional dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran B)

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

D.2.1. PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp71,22 juta Saldo Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah masing-masing sebesar *Rp1.000.000.000* dan *Rp1.000.000.000*. Keseluruhan Pendapatan Operasional merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30 September 2019 seluruhnya berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya masing-masing sebesar *1.000.000.000* dan *1.000.000.000* terjadi kenaikan sebesar *1.000.000.000* atau *100.000.000*.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya adalah pendapatan negara yang bukan merupakan pendapatan dari pajak atau pun pendapatan hibah dan bukan bagian dari pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam maupun pendapatan bagian pemerintah atas laba.

CaLK LO – Halaman 62

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 43: Neraca Percobaan Akrual LO

3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		
3	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		
3	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1.140.000,00	1.140.000,00
3	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	800,00	800,00
3	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS		
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	200.000,00	200.000,00
3	511122	Beban Tunj. Anak PNS	70.000,00	70.000,00

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2020
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NPSADKB
Tanggal : 15-10-20
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROPINSI : 2300 NUSA TENGGARA BARAT
SATUAN KERJA : 890614 SATKER INI BELUM DIREKAM

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	100.000,00	100.000,00
3	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS		
3	511125	Beban Tunj. PPh PNS	0,00	0,00
3	511126	Beban Tunj. Beras PNS	100.000,00	100.000,00
3	511129	Beban Uang Makan PNS	200.000,00	200.000,00
3	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	10.000,00	10.000,00
3	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS		
3	512211	Beban Uang Lembur	100.000,00	100.000,00
3	521111	Beban Keperluan Perkantoran	200.000,00	200.000,00
3	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	10.000,00	10.000,00
3	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	0,00
3	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	200.000,00	200.000,00
3	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	200.000,00	200.000,00
3	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.000,00	10.000,00
3	521211	Beban Bahan	200.000,00	200.000,00
3	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00
3	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	40.000,00	40.000,00
3	522111	Beban Langganan Listrik	400.000,00	400.000,00
3	522112	Beban Langganan Telepon	50.000,00	50.000,00
3	522113	Beban Langganan Air	0,00	0,00
3	522131	Beban Jasa Konsultan	200.000,00	200.000,00
3	522141	Beban Sewa	0,00	0,00
3	522151	Beban Jasa Profesi	0,00	0,00
3	522191	Beban Jasa Lainnya	0,00	0,00
3	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00
3	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
3	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 44: Analisis Form LPE

Form Analisa LPE_TW III NTV 2020 [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

Microsoft account - X

Editing

AutoSum - Fill - Sort & Find & Filter - Select - Clear -

Insert - Delete Format -

Cells

Styles

Normal - Bad - Calculation - Check Cell -

Conditional Format as Table -

General - Number -

Alignment -

Font -

Clipboard -

HOME - INSERT - PAGE LAYOUT - FORMULAS - DATA - REVIEW - VIEW

Calibri - 10 - Wrap Text - Merge & Center -

FILE - EDITOR -

READY 19:30 18/11/2020

KERTAS KERJA ANALISA LAMARAN PERUBAHAN EKUITAS SATUAN KERJA RI PERIODE 30 September 2020				
1	NAMA SATKER	Sama	Tidak	Seluruhnya
2	ESSELON / SATKER / 01 (sejelan) / 02 (Pusat)	✓	✓	Sama
3	KODE SATKER	✓	✓	Sama
4		✓	✓	Sama
5	1. Verifikasi kesesuaian koreksi. Angka			
6	10			
7	11			
8	12			
9	13			
10	14			
11	15			
12	16			
13	17			
14	18			
15	19			
16	20			
17	21			
18	22			
19	23			
20	24			
21	25			
22	26			
23	27			
24	28			
25	29			

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 45: Neraca *Face LPE*

*Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2020*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2020 DAN
30 SEPTEMBER 2019
(Dalam Rupiah)**

URAIAN	CATATAN	30 SEPTEMBER 2020	30 SEPTEMBER 2019
EKUITAS AWAL	E.2.1	10.000.000.000	10.000.000.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.2	10.000.000.000	10.000.000.000
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.2.3	100.000	1.000.000
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.2.3.1	-	1.000.000
Koreksi Lain-lain	E.2.3.2	100.000	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2.4	10.000.000.000	10.000.000.000
EKUITAS AKHIR	E.2.5	10.000.100.000	10.001.000.000

*Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari laporan keuangan ini – Halaman 8*

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan
Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 46: CaLK LPE

Laporan Keuangan Satuan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Periode Yang Berakhir 30 September 2020



E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 59
Rincian Perbandingan Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30
September 2019
(dalam Rupiah)

Braian	30 September 2020	30 September 2019	%
Ekuitas Awal	8.855.744,00	8.855.744,00	100,00
Surplus Defisit LO	1.123.784,41	1.123.784,41	125,21
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	18,00	18,00	0,20
Transaksi Antara Entitas	1.123.784,41	1.123.784,41	125,21
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	2.077,41	2.077,41	0,23
Ekuitas Akhir	9.979.626,82	9.979.626,82	112,23

Jumlah Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar *Rp8.855,74 juta*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 sebesar *Rp1.123,78 juta*

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 sebesar *Rp18,00*

Jumlah Transaksi Antara Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 sebesar *Rp1.123,78 juta*

Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 sebesar *Rp9.979,63 juta*

(Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pendukung Lampiran 9)

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.2.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Rp56.855,74 juta Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 adalah masing-masing sebesar *Rp8.855,74 juta* dan *Rp8.855,74 juta*

Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu.

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 47: Kertas Kerja Analisis Satuan Kerja Laporan BPK RI

Lampiran 47. 1: Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Semester I Tahun 2020

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN 2017 UNAUDITED**

Kode dan Nama UAKPA :
 Kode dan Nama UAPPAW :
 Kode dan Nama E1 :
 Kode dan Nama K/L : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. LRA face periode TA 2020	✓		Ada
3. Neraca per 30 Juni 2020	✓		Ada
4. Laporan Operasional periode TA 2020	✓		Ada
5. Laporan Perubahan Ekuitas periode TA 2020	✓		Ada
6. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Lampiran Pendukung LK (Cetakan Aplikasi SAIBA Satker yg Wajib. Bisa Softcopy Pdf)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual per 30 Juni 2020	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Awal Tahun Anggaran Berjalan	✓		Ada
3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan KPPN/e-Rekon-LK	✓		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna	✓		Ada
6. Berita Acara Stock-Opname Persediaan TA 2020	✓		Ada
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah satker Neracanya tidak balance? Cek di E-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"		✓	Tidak
Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	✓		Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
KESESUAIAN HARD COPY DENGAN E-REKON-LK			
Kesesuaian Saldo Awal	Sama	Tidak	Seharusnya
-- Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Awal dari SAIBA 2017 sama dengan Neraca Percobaan Awal dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
Kesesuaian Saldo 31 Desember 2017	Sama	Tidak	Seharusnya
-- Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Akrual pada LK sama dengan Neraca Percobaan Akrual dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
-- Apakah seluruh akun Laporan Operasional pada LK sama dengan Laporan Operasional dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
-- Apakah seluruh akun Laporan Perubahan Ekuitas pada LK sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
-- Apakah seluruh akun Neraca pada LK sama dengan Neraca dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
-- Apakah seluruh akun Laporan Realisasi Anggaran pada LK sama dengan Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		✓	Tidak
2. Adakah "Saldo tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun Beban Penyisihan Piutang			Tidak
Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (10000) bersaldo (D) (acc.Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (11600) bersaldo (K)	✓		Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (13700 dan 36900) bersaldo (K)	✓		Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (20000) bersaldo (K)	✓		Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (40000) bersaldo (K) (acc.Pengembalian Pendapatan)	✓		Ya

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 47. 2: Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2019

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN 2019 UNAUDITED

Kode dan Nama UAKPA :
Kode dan Nama UAPPAW :
Kode dan Nama E1 :
Kode dan Nama K/L : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beribunda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. LRA face periode TA 2019	✓		Ada
3. Neraca per 31 Desember 2019	✓		Ada
4. Laporan Operasional periode TA 2019	✓		Ada
5. Laporan Perubahan Ekuitas periode TA 2019	✓		Ada
6. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Lampiran Pendukung LK (Cetakan Aplikasi SAIBA Sather yg Wajib. Bisa Softcopy Pdf)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual per 31 Desember 2019	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Awal Tahun Anggaran Berjalan	✓		Ada
3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan KPPN/e-Rekon-LK	✓		Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna	✓		Ada
6. Berita Acara Stock-Opname Persediaan TA 2019	✓		Ada
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah saliter Neracanya tidak balance? Cek di E-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"			Tidak
Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/Defisit-LG" = Nilai "Surplus/(Defisit) - LG" di LPE	✓		Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	✓		Sama
3. Neraca Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
KESESUAIAN HARDCOPY DENGAN E-REKON-LK			
Kesesuaian Saldo Awal	Sama	Tidak	Seharusnya
- Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Awal dari SAIBA 2019 sama dengan Neraca Percobaan Awal dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
Kesesuaian Saldo 31 Desember 2019	Sama	Tidak	Seharusnya
- Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Akrual pada LK sama dengan Neraca Percobaan Akrual dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
- Apakah seluruh akun Laporan Operasional pada LK sama dengan Laporan Operasional dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
- Apakah seluruh akun Laporan Perubahan Ekuitas pada LK sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
- Apakah seluruh akun Neraca pada LK sama dengan Neraca dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
- Apakah seluruh akun Laporan Realisasi Anggaran pada LK sama dengan Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		✓	Tidak
2. Adakah "Saldo tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun Beban Penyisihan Piutang			Tidak
Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (10000) bersaldo (D) (rec.Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (11600) bersaldo (K)	✓		Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (13700 dan 36900) bersaldo (K)	✓		Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (20000) bersaldo (K)	✓		Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (40000) bersaldo (K) (rec.Pengembalian Pendapatan)	✓		Ya

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 47. 3: Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN 2020 UNAUDITED

Kode dan Nama UAKPA :
Kode dan Nama UAPPAW :
Kode dan Nama E1 :
Kode dan Nama K/L : 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Objek Penelahaan	Kondisi LK		Seharusnya
Berilah tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENCKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. LRA face periode TA 2020	✓		Ada
3. Neraca per 30 September 2020	✓		Ada
4. Laporan Operasional periode TA 2020	✓		Ada
5. Laporan Perubahan Ekuitas periode TA 2020	✓		Ada
6. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Lampiran Pendukung LK (Cetakan Aplikasi SAIBA Satker yg Wajib. Bisa Softcopy Pdf)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual per 30 September 2020	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Awal Tahun Anggaran Berjalan	✓		Ada
3. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan KPPN/e-Rekon-LK		✓	Ada
4. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
5. Laporan Barang Kuasa Pengguna	✓		Ada
6. Berita Acara Stock-Opname Persediaan TA 2020		✓	Ada
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca Balance	Ada	Tidak	Seharusnya
Adakah satker Neracanya tidak balance? Cek di E-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance"			Tidak
Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	✓		Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
KESESUAIAN HARDCOPY DENGAN E-REKON-LK			
Kesesuaian Saldo Awal	Sama	Tidak	Seharusnya
- Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Awal dari SAIBA 2020 sama dengan Neraca Percobaan Awal dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
Kesesuaian Saldo 30 September 2020	Sama	Tidak	Seharusnya
- Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Akrual pada LK sama dengan Neraca Percobaan Akrual dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
- Apakah seluruh akun Laporan Operasional pada LK sama dengan Laporan Operasional dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
- Apakah seluruh akun Laporan Perubahan Ekuitas pada LK sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
- Apakah seluruh akun Neraca pada LK sama dengan Neraca dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
- Apakah seluruh akun Laporan Realisasi Anggaran pada LK sama dengan Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya		✓	Tidak
2. Adakah "Saldo tidak normal"? Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal", kecuali akun Beban Penyisihan Piutang			Tidak
Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (10000) bersaldo (D) (kec.Penyisihan dan Akumulasi)	✓		Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116000) bersaldo (K)	N/A	N/A	Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137000 dan 569000) bersaldo (K)	✓		Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (200000) bersaldo (K)	✓		Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (400000) bersaldo (K) (kec.Pengembalian Pendapatan)	✓		Ya

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Lampiran 48: Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka

Lampiran 48. 1: Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Semester I Tahun 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
11	11	11	1	1	1	1
12	31	31	2	2	2	2
1	31	31	3	3	3	3
2	31	31	4	4	4	4
3	31	31	5	5	5	5
4	30	30	6	6	6	6
5	31	31	7	7	7	7
6	30	30	8	8	8	8
7	31	31	9	9	9	9
8	31	31	10	10	10	10
9	30	30	11	11	11	11
10	31	31	12	12	12	12
11	31	31	1	1	1	1
12	31	31	2	2	2	2
13	30	30	3	3	3	3
14	31	31	4	4	4	4
15	31	31	5	5	5	5
16	30	30	6	6	6	6
17	31	31	7	7	7	7
18	31	31	8	8	8	8
19	30	30	9	9	9	9
20	31	31	10	10	10	10
21	31	31	11	11	11	11
22	31	31	12	12	12	12
23	31	31	1	1	1	1
24	31	31	2	2	2	2
25	30	30	3	3	3	3
26	31	31	4	4	4	4
27	31	31	5	5	5	5
28	30	30	6	6	6	6
29	31	31	7	7	7	7
30	31	31	8	8	8	8
31	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6	6	6
	31	31	7	7	7	7
	31	31	8	8	8	8
	30	30	9	9	9	9
	31	31	10	10	10	10
	31	31	11	11	11	11
	31	31	12	12	12	12
	31	31	1	1	1	1
	31	31	2	2	2	2
	30	30	3	3	3	3
	31	31	4	4	4	4
	31	31	5	5	5	5
	30	30	6	6</		

Lampiran 49: Surat Keterangan Selesai PKL



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No.31
Jakarta Pusat

SURAT KETERANGAN MAGANG

No. 8/SK. MAGANG/X.4.3.3/11/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutitah Utami
Jabatan : Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II
NIP : 196304081987032002

Menerangkan bahwa :

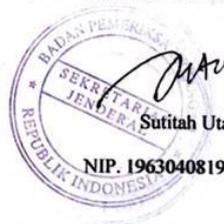
Nama : Rahmatika Firmansyah
Universitas : Universitas Negeri Jakarta
Jurusan : Akuntansi
NIM : 1706617021

Bahwa yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas magang dari 1 September 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 di Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta dan telah selesai melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 November 2020


Sutitah Utami
NIP. 196304081987032002



Lampiran 50: Penilaian PKL Universitas Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
 FAKULTAS EKONOMI
 Kampus Universitas Negeri Jakarta, Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
 Laman www.fe.unj.ac.id

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
 PROGRAM SARJANA (S1)
 2 SKS

Nama : Rahmatika Firmansyah
 No.Registrasi : 1706617021
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Tempat Praktik : Badan Pemeriksa Keuangan RI
 Alamat Praktik/Telp : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31
 Jakarta Pusat 10210/ (021) 255 49000

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 46-100	KETERANGAN																																			
1	Kehadiran	...100...	1. Keterangan Penilaian : <table border="1"> <tr> <td>Skor</td> <td>Nilai</td> <td>Bobot</td> </tr> <tr> <td>86-100</td> <td>A</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>81-85</td> <td>A-</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>76-80</td> <td>B+</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>71-75</td> <td>B</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>66-70</td> <td>B-</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>61-65</td> <td>C+</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>56-60</td> <td>C</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>51-55</td> <td>C-</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>46-50</td> <td>D</td> <td>1</td> </tr> </table> 2. Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efektif Nilai Rata-rata : <table border="1"> <tr> <td>.....876..... = ...87,6..... 10 (sepuluh)</td> </tr> </table> Nilai Akhir : <table border="1"> <tr> <td>88</td> <td>Delapan puluh delapan</td> </tr> <tr> <td>Angka bulat</td> <td>huruf</td> </tr> </table>	Skor	Nilai	Bobot	86-100	A	4	81-85	A-	3,7	76-80	B+	3,3	71-75	B	3,0	66-70	B-	2,7	61-65	C+	2,3	56-60	C	2,0	51-55	C-	1,7	46-50	D	1876..... = ...87,6..... 10 (sepuluh)	88	Delapan puluh delapan	Angka bulat	huruf
Skor	Nilai	Bobot																																				
86-100	A	4																																				
81-85	A-	3,7																																				
76-80	B+	3,3																																				
71-75	B	3,0																																				
66-70	B-	2,7																																				
61-65	C+	2,3																																				
56-60	C	2,0																																				
51-55	C-	1,7																																				
46-50	D	1																																				
.....876..... = ...87,6..... 10 (sepuluh)																																						
88	Delapan puluh delapan																																					
Angka bulat	huruf																																					
2	Kedisiplinan	...86...																																				
3	Sikap dan Kepribadian	...85...																																				
4	Kemampuan Dasar	...85...																																				
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	...85...																																				
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	...83...																																				
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	...87....																																				
8	Aktivitas dan Kreativitas	...85....																																				
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	...90....																																				
10	Hasil Pekerjaan	...90....																																				
Jumlah		...876...																																				

Jakarta, 30 Oktober 2020
 Penilai,

 SUTITAH UTAMI
 Sekretaris Jendral
 Badan Pemeriksa Keuangan
 Republik Indonesia

Catatan :
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 51: Penilaian PKL untuk BPK RI

FORMULIR PENILAIAN MAGANG MAHASISWA

Nama : Rahmatika Firmansyah
NIM : 1706617021
Program Studi : SI Akuntansi
No HP : 085718444987

Magang telah dilaksanakan dari ~~Sept~~ sampai dengan ~~Oktober~~

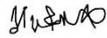
Penilaian pelaksanaan magang mahasiswa adalah sebagai berikut:

NO	PENILAIAN	NILAI ANGKA (0-100)	NILAI
1	Kehadiran	100	A
2	Kerjasama dalam tim	80	A
3	Partisipasi aktif	85	A
4	Komunikasi/interaksi	85	A
5	Kinerja	90	A
6	Disiplin dan Tanggung Jawab	85	A
7	Kreatifitas	80	A
Jumlah			

Keterangan

- 80-100 = A
- 70-79 = B
- 60-69 = C
- 50-59 = D
- <50 = E

Jakarta, 30 2020
Pembimbing Lapangan


Wiwin Adhi Tama

Lampiran 52: Kartu Konsultasi PKL



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Gedung R Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
 Telp : (021) 4721227, Fax : (021) 4706385
 www.fekun.jac.id

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

1. Nama Mahasiswa : Rahmatika Firmansyah.....
 2. No.Registrasi : 17008017021.....
 3. Program Studi : ST, Akuntansi, A, 2017.....
 4. Dosen Pembimbing : Adnan Zakaria, SE, Akd, M, S, U, P, D.....
 NIP. 197504212008011011.....

5. Judul PKL : Laporan, Praktik Kerja Lapangan Pada
 Badan Perantara Keuangan Republik Indonesia.....

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	02 November 2020	Bab I	Latih Belakang ditambahkan referensi.	<i>[Signature]</i>
2	09 November 2020	Mengirim Bab I revisi dan Bab II	Bab II ditambahkan referensi dan diparrafase.	<i>[Signature]</i>
3	12 November 2020	Mengirim Bab II revisi dan Bab III	Bab III lebih diperjelas dan jangan ada pengulangan	<i>[Signature]</i>
4	17 November 2020	Berdiskusi terkait penyusunan Bab III	Penyusunan agar lebih detail disertai hasil kerja.	<i>[Signature]</i>
5	20 November 2020	Mengirim Bab III revisi, Lampiran, dan Bab IV	Dijelaskan tahap pengecekan sebelum publikasi.	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

SEPTUJU UNTUK UJIAN PKL

[Signature]
22/11/20

Catatan :
 1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi
 2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat digunakan sebagai bukti pembimbingan